

**DEMOKRASI SEBAGAI POLITIK DISSENSUS  
(UTOPIA KOEKSENSISTENSIAL DI ERA PARADOKS)**

**DISERTASI  
(Ringkasan)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada  
Program Studi Ilmu Filsafat Program Pascasarjana Departemen Filsafat  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.  
Dipertahankan di hadapan Sidang Akademik Universitas Indonesia di bawah  
pimpinan Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa  
Somantri pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2010, pukul 10.00 WIB di Kampus  
Universitas Indonesia.**

**Promotor: Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo  
Kopromotor: Vincensius Y. Jolasa Ph.D**

**BUDIARTO DANUJAYA  
NPM: 0706222082**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU FILSAFAT  
DEPOK  
JULI, 2010**



FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
Tanggal : 18 Agustus 2010  
Nomor : Ds. 1000007a

PERPUSTAKAAN

## ABSTRACT

Name : Budiarto Danujaya  
Study Program: Philosophy  
Title : Democracy as A Dissensus Politics (Coexistential Utopia in the Era of Paradox)

This dissertation scrutinizes the possibility of politics and its constitutive consequence to the sufficiency of democratic politics correlated to nowadays delegitimatization of collective moral entity. Ethicopolitical paradox, as this plurality pluralization radicalization consequence, is proven not exterminating politics possibility as far as the paradigm to understand it should be changed more as coexistential utopia rather than effort. Then social interrelation should be accepted as interunicum coexistence, so that the axes of sociopolitical principles become freedom, pluralism, and tolerance. However, the politics of pluralistic democracy is still sufficient to face this changing agenda as far as the paradigm to understand and to practice it should also be changed more as a politics of dissensus rather than consensus. Within the dissensual democratic pluralism framework, its politics of pluralism is going to be radicalized through the constitutive consequence of social agent alterity and discursivity irreducibility recognition, making it more inclusive as the consequence of infinite contingency, therefore also making it more sufficient to this era of paradox.

**Key words:**

*Telekoinonia*, ethicopolitical paradox, polysemy, coexistential utopia, inter-unicum coexistence, *dissensus communis*, the political, alterity and discursivity, *dissensus* democracy, agonistic pluralism, contingency, hegemonic solidarity bloc, open-ended hegemony.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Setiap karya tulis pada galibnya adalah sebuah momen opname --setitik terminal artikulatif yang seyogyanya sementara-- dalam lintasan panjang perjalanan artikulatif tak berpangkal tak berujung, tempat segenap masing-masing individu sebagai agen sosial bersiasah-asih-asuh dengan para seluarnya, dengan *constitutive-outside*-nya. Dalam pengertian inilah, betapapun sebuah disertasi ditulis dalam keheningan, dan boleh jadi bahkan juga dalam kesepian, namun takkan kunjung pernah sungguh-sungguh dalam kesendirian. Pewujudan penelitian ini menjadi disertasi tertulis, bagi saya, menegaskan kembali betapa utang-piutang artikulatif adalah sebuah kesenantiasaan bahkan keniscayaan sosial semacam itu. Sehubungan itulah saya hendak menghaturkan terima kasih dari lubuk hati terdalam kepada segenap para pihak yang dengan berbagai caranya masing-masing tersendiri telah membantu mewujudkan disertasi ini.

Pertama-tama, ucapan terima kasih ini: saya haturkan kepada Bapak Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo selaku promotor dan Bapak Vincensius Y. Jolasa Ph.D selaku kopromotor saya, yang telah meluangkan sedemikian banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing maupun, terutama, memberi masukan, kritik, dan saran sehingga penelitian ini bisa berlangsung dengan lancar serta bisa menemukan bentuk dan pengucapan yang lebih layak untuk dipertahankan sebagai sebuah disertasi. Demikian pula, ucapan terima kasih ini juga saya haturkan kepada segenap anggota Dewan Penguji yang terhormat, yakni Bapak Dr. Akhyar Yusuf Lubis (Ketua), serta Ibu Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi, Bapak Prof. Dr. M. Sastrapratedja, Bapak Prof. Dr. A. Agus Nugroho, dan Bapak Dr. A. Harsawibawa, yang telah melontarkan sedemikian banyak kritik maupun memberi masukan dan saran yang membuat disertasi ini berkembang menjadi lebih kompleks dan konstruktif tanpa meninggalkan radikalitasnya.

Rasa syukur dan terima kasih juga saya haturkan kepada rekan-rekan seperjuangan di lingkungan Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang telah memberikan suasana dialogis dan ruang artikulatif yang lapang untuk membentur-benturkan gagasan-gagasan awal disertasi ini sehingga bisa lebih memadai untuk dilanjutkan menjadi penelitian yang lebih ilmiah. Begitu pula, ucapan terima kasih ini saya haturkan kepada segenap staf sekretariat, baik Mbak

Munawaroh, Mbak Dwi, maupun Mbak Ima, yang telah banyak saya reportkan sehubungan dengan proses penyelesaian disertasi ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih ini juga saya haturkan kepada almarhum Dr. Anton Baker, pembimbing skripsi program sarjana saya pada Jurusan Filsafat Barat Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, yang membuat saya terpesona akan filsafat, dan sejak jauh hari meyakinkan saya untuk menempuh program semacam ini; serta kepada Bapak Agung Iriantoko M.Phil, pengajar filsafat ekonomi saya pada Program Pascasarjana Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yang merangsang saya untuk menjelajah diskursus-diskursus kontemporer dalam bidang politik dan ekonomi, maupun menjadi teman mendiskusikan persoalan-persoalan sosiopolitik negeri kita, Indonesia.

Akhirul kata saya hendak membuat pengakuan sejujurnya betapa penelitian ini takkan berakhir menjadi sebuah disertasi tanpa sahabat sependaritan dan sepenanggungan saya, Yustina, yang dengan caranya tersendiri selalu berhasil menghindarkan saya dari keputusasaan berkepanjangan, termasuk dalam menenggang berbagai kesulitan kehidupan lebih menyeluruh yang harus saya hadapi semasa penyelesaian disertasi ini. Bersengkarut dengan itu, saya juga hendak mengajukan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada Orchida Sekarratri dan Degas Elangpaksi, sepasang sahabat saya lainnya, atas terlalu acapnya ketidakhadiran saya, baik pikiran apalagi perhatian, pada saat-saat suka maupun terutama duka mereka dalam beberapa tahun belakangan karena terlalu masyuk dengan penyelesaian penelitian ini. Sesungguhnya, hanya atas nama pengorbanan mereka bertiga sajalah penelitian ini bisa rampung.

Sesungguhnya, seseorang memang tak lain tak bukan senantiasa adalah para seluarnya; adalah para *constitutive-outside*-nya.

Depok, 1 Juli 2010

Budiarto Danujaya

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	<b>i</b>
<b>Abstract</b>	<b>ii</b>
<b>Ucapan Terima Kasih</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>v</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Bagan Alur Penelaahan Disertasi</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Permasalahan, Kerangka Teori, dan Pernyataan Penelitian</b>	<b>2</b>
<b>2. ERA TELEKOINONIA DAN KONSEKUENSI ETIKOPOLITIKNYA</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Bagan Alur Penelaahan Era Telekoinonia dan Konsekuensi Etikopolitiknya</b>	<b>3</b>
<b>2.2. Delegitimasi Entitas Pertimbangan Kolektif</b>	<b>4</b>
<b>3. POLITIK SEBAGAI UTOPIA KOEKSENSIAL</b>	<b>6</b>
<b>3.1. Bagan Alur Penelaahan Possibilitas Politik Sebagai Utopia Koeksistensial</b>	<b>6</b>
<b>3.2. Koeksistensi Antar Unikum: Utopia Koeksistensial dalam Paradigma Dissensus</b>	<b>7</b>
<b>4. DEMOKRASI SEBAGAI POLITIK KONSENSUS: KONSTITUTIVITAS, PARADOKS PRAKSIS, DAN LIMITNYA</b>	<b>10</b>
<b>4.1. Bagan Alur Penelaahan Konstitutivitas, Paradoks Praksis, dan Limit Demokrasi Konsensus</b>	<b>10</b>
<b>4.2. Paradoks Praksis Demokrasi Modern: Limit Kelenturan Artikulatif Politik Konsensus</b>	<b>11</b>
<b>5. DEMOKRASI SEBAGAI POLITIK DISSENSUS: PELUANG DAN TANTANGAN KOEKSENSIAL DI ERA POLISEMI DAN PARADOKS</b>	<b>14</b>

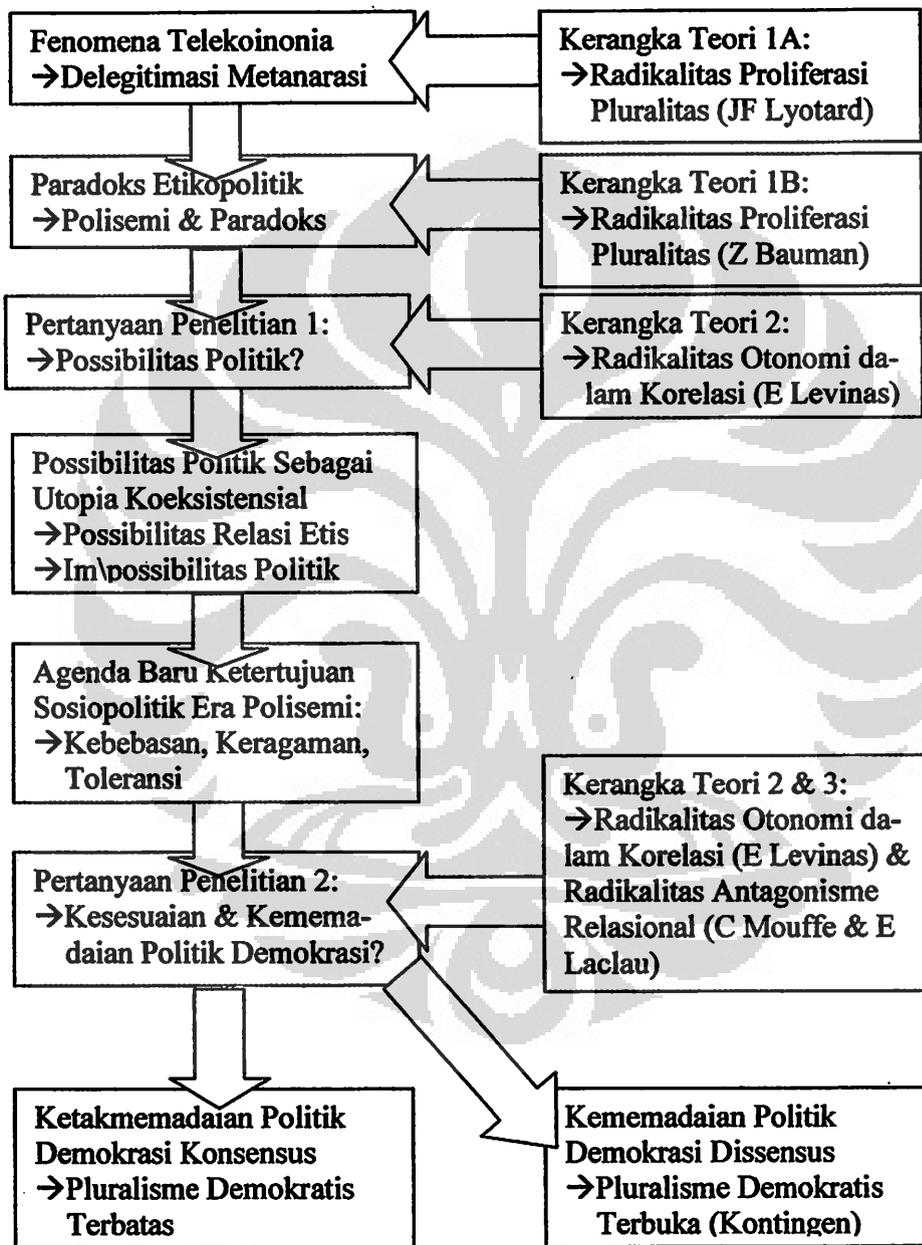
5.1.	<b>Bagan Alur Penelaahan Peluang dan Tantangan Demokrasi Dissensus di Era Polisemi dan Paradoks</b>	<b>14</b>
5.2.	<b>Kesesuaian dan Kememadaian Politik Demokrasi Dissensus Terhadap Konsekuensi Radikalisasi Polisemi dan Paradoks</b>	<b>15</b>
6.	<b>KESIMPULAN, KONTEKSTUALITAS, DAN KONTRIBUSI PENELITIAN</b>	<b>20</b>
6.1.	<b>Kesimpulan</b>	<b>20</b>
6.2.	<b>Kontekstualitas, dan Kontribusi Penelitian</b>	<b>25</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>33</b>
	<b>RIWAYAT HIDUP</b>	<b>40</b>



## DEMOKRASI SEBAGAI POLITIK DISSENSUS (UTOPIA KOEKSISTENSIAL DI ERA PARADOKS)

### 1. Pendahuluan

#### 1.1. Bagan Alur Penelaahan Disertasi



**Diagram 1.1. Bagan Alur Penelaahan Disertasi**

## 1.2. Permasalahan, Kerangka Teori, dan Pernyataan Penelitian

Radikalisasi proliferasi pluralitas akibat delegitimasi metanarasi dewasa ini mengakibatkan paradoks etikopolitik, karena bukan hanya mengembalikan dan bahkan menyangatkan fitrah etis manusia --kebebasan memilih, dan karena itu sepenuhnya bertanggung-jawab sendiri atas pilihan bebasnya-- melainkan juga menghilangkan kemudahan untuk menyandarkan pilihannya pada narasi-narasi besar tertentu lainnya pada era-era sebelumnya. Sebagai konsekuensi konstitutifnya terjadilah polivalensi etis. Segenap entitas pertimbangan kolektif yang coba diberlakukan supraindividual, suprakomunal, apalagi universal mengalami kelongsoran legitimasi.

Menilik politik pada dasarnya merupakan upaya koeksistensial sadar, sengaja, terarah jelas dan terencana sistematis, sehingga membutuhkan entitas pertimbangan kolektif tertentu sebagai idealitasnya, maka delegitimasi ini membuat kemungkinan politik dan konsekuensi konstitutifnya pada kesesuaian (*compatibility*) dan kememadain (*sufficiency*) politik demokrasi berada dalam pertanyaan besar. Oleh karena itulah, permasalahan penelitian ini menyangkut dua pokok. Pertama, kemungkinan politik sebagai utopia koeksistensial dalam perubahan paradigma posmodern. Kedua, perubahan paradigma yang harus ditempuh politik demokrasi dalam rangka merawat kesesuaian dan kememadain nilai-nilai derivatifnya sebagai sorok politik koeksistensial.

Lewat bantuan sintesa tiga kerangka teori berbeda namun mengerucut pada semangat etikopolitik pluralisme demokratis dissensual yang sama, yakni radikalitas proliferasi pluralitas dari Jean-Francois Lyotard dan Zygmunt Bauman, radikalitas otonomi dalam korelasi dari Emmanuel Levinas, dan radikalitas antagonisme relasional dari Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau, penelitian ini membuktikan bahwa paradoks etikopolitik tersebut tak memunahkan kemungkinan politik sejauh paradigma pemahamannya diubah lebih sebagai utopia ketimbang upaya koeksistensial. Demikian pula, politik demokrasi pluralis terbukti juga tetap memadai untuk menghadapi perubahan faktisitas sosiopolitik global ini sejauh paradigma pemahaman dan penerapannya juga diubah bukan lagi sebagai sebuah upaya koeksistensial untuk mencapai konsensus apapun biaya sosiopolitiknya, melainkan lebih sebagai sebuah utopia koeksistensial untuk menerima dan mengelola dissensus secara sehat apapun risikonya. Jadi, politik demokrasi lalu harus lebih disadari sebagai agoni mengelola konflik ketimbang deliberasi mencapai harmoni.

Universitas Indonesia

KONSENSUS	DISSENSUS
<p><b>Asumsi Antropologis:</b>  <b>Rasionalitas Individualisme Normatif</b>            Setiap warga sebagai individu merupakan agen rasional dan mandiri yang <i>ipso facto</i> akan seragam menanggapi keadaan hipotesis identik sejauh tak ada faktor bias (hegemoni; delusi; parsialitas informasi) atas pilihan rasional mereka (Kant); khususnya pada 'posisi azali' kontrak sosial 'di balik layar ketaktahuan' (Rawls).</p>	<p><b>Asumsi Antropologis:</b>  <b>Radikalitas Otonomi dalam Korelasi</b>            Setiap warga sebagai individu merupakan unikum yang alteritas perbedaannya bersifat unik, tak terjematkan, apalagi terleburkan dalam keterhubungannya dengan individu-individu lain, sehingga mengakibatkan radikalitas (ketaktereduksian) otonomi dalam korelasi.</p>
<p><b>Suposisi Koeksistensial:</b>  <b>Korelasi Konsensual</b>  <i>Sensus communis</i> bukan hanya mungkin melainkan bahkan merupakan desideratum interrelasional, sehingga praksis koeksistensialnya adalah deliberasi konsensual berkeputusan untuk memaksimalkan kesepakatan aktual (memperluas mereka yang setuju dan memperdalam persetujuan mereka).</p>	<p><b>Suposisi Koeksistensial:</b>  <b>Koeksistensi antar Unikum</b>  <i>Dissensus Communis</i> merupakan faktisitas interrelasional, sehingga praksis koeksistensialnya adalah agoni dissensual berkeputusan meminimalisasi ketaksepakatan konfliktual (mempersempit mereka yang tak setuju atau mengoridori ketaksetujuan mereka dalam idealitas pluralisme demokratis).</p>

Tabel 1.2. Perbandingan Paradigma Politik Konsensus dan Dissensus

## 2. Era Telekoinonia dan Konsekuensi Etikopolitiknya

### 2.1. Bagan Alur Penelaahan Era Telekoinonia dan Konsekuensi Etikopolitiknya

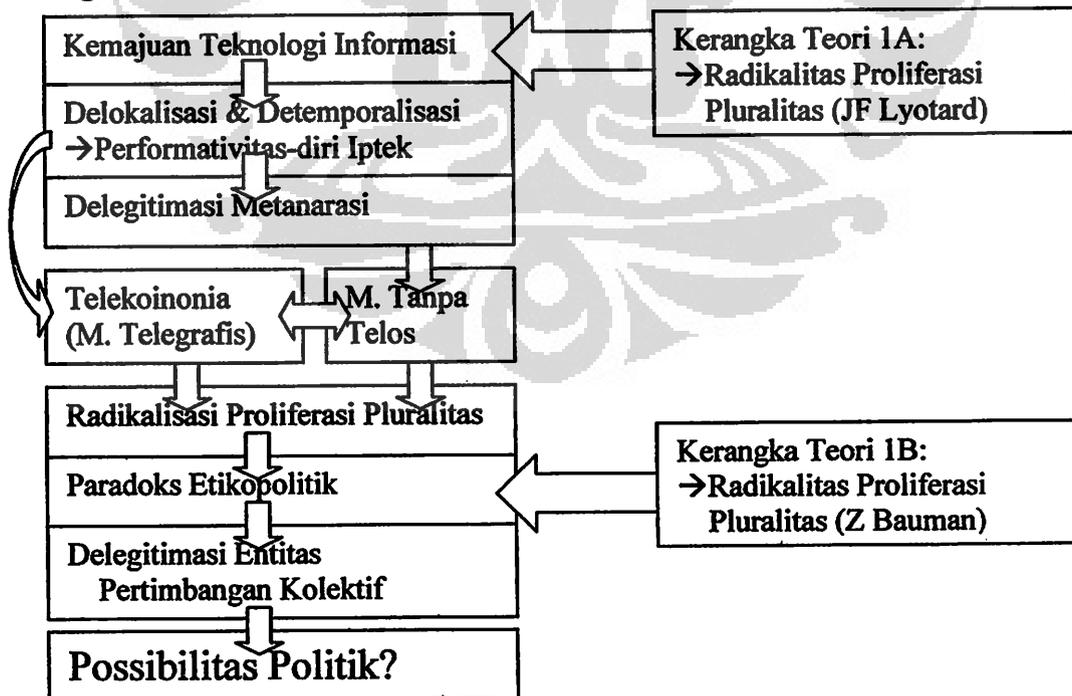
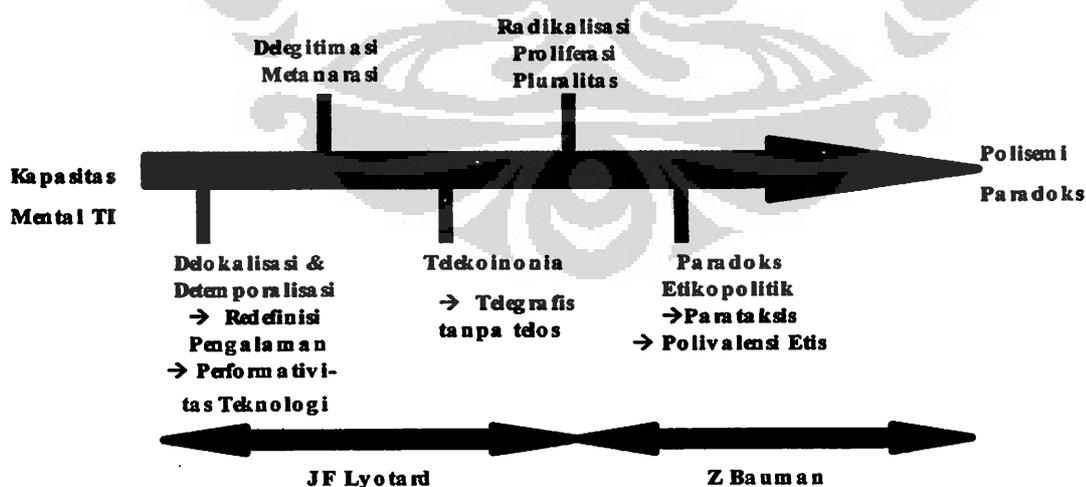


Diagram 2.1. Bagan Alur Era Telekoinonia & Konsekuensi Etikopolitiknya

## 2.2. Delegitimasi Entitas Pertimbangan Kolektif

Dengan bantuan pemikiran Lyotard dan Bauman mengenai radikalitas proliferasi pluralitas dan konsekuensi etisnya, bab ini mencoba mengurai simtoma perubahan faktisitas sosiopolitik global yang harus dihadapi politik di era ini, guna mendapatkan perspektif lebih utuh atas permasalahan yang akan diteliti. Sebagai upaya koeksistensial, politik harus menghadapi paradoks etis, yakni keserentakan pengembalian fitrah etis manusia dan penghapusan kenyamanan ketersediaan arah universal seperti janji modernisme sebagai akibat delegitimasi metanarasi.<sup>1</sup> Menilik delegitimasi narasi-narasi besar sekaligus berarti legitimasi narasi-narasi kecil, maka terjadilah radikalitas proliferasi pluralitas, sehingga paralogisme, serta konsekuensi konstitutifnya pada pengakuan atas ketakterjembatanan keragaman, perbedaan, dan dissensus, lalu menjadi corak baru legitimasi.<sup>2</sup> Inilah rangkaian kondisi anteseden delegitimasi entitas pertimbangan kolektif yang memuncakkan polisemi dan paradoks sebagai faktisitas sosiopolitik global tak tertampikkan sejalan dengan perkembangan kapasitas 'mental' teknologi informasi digital, seperti tampak lewat diagram tulang ikan di bawah ini:

**Diagram 2.1. Kondisi Anteseden Delegitimasi Entitas Pertimbangan Kolektif**



<sup>1</sup> Bauman, Zygmunt, (2003), *Intimations of Posmodernity*, London: Taylor & Francis e-Library, p. xxii.

<sup>2</sup> Lyotard, Jean-Francois, (2001), *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Manchester: Manchester University Press, pp. 65-66.

Dalam rangkaian gejala radikalisme polisemi dan paradoks tersebut, perkembangan teknologi informasi membuat iptek kembali menjadi faktor penentu perubahan paradigma pengetahuan manusia. Dalam hal ini, kapabilitas teknologi komputer menjalankan fungsi mental manusia –yakni membiasakan, mengingat dan mengenang kembali--<sup>3</sup> memungkinkan digitalisasi informasi sehingga mendorong redefinisi proses mengalami. Pengalaman tak membutuhkan ‘transplantasi’ tubuh lagi, dalam arti tak lagi menuntut kehadiran manusia secara ragawi dan inderawi, apalagi dalam arti langsung.<sup>4</sup> Selain itu, kepraktisan akibat miniaturisasi teknologi komputer membuka peluang komersialisasi secara massal, sehingga bersama kecakapan teknologi internet menciptakan virtualisasi kesejaringan masyarakat informasi global, mengakibatkan proliferasi teknologi informasi yang tak alang-kepalang pesatnya.<sup>5</sup>

Proliferasi teknologi informasi, di satu sisi, mengakibatkan radikalisme proses delokalisasi dan detemporalisasi informasi, pengetahuan dan kebudayaan. Sementara di sisi lain, kesempatannya untuk terus-menerus menghadirkan diri kembali secara proliferasi sekaligus memberinya kesempatan untuk juga terus-menerus memproduksi bukti keabsahannya, sehingga lalu tak lagi memerlukan metanarasi di luar dirinya apapun untuk mendukung legitimasi keberadaannya, melainkan cukup performativitasnya sendiri.<sup>6</sup> Perubahan ini mengakibatkan delegitimasi narasi-narasi besar sebagai metanarasi. Akibatnya, masyarakat telegrafis tanpa tujuan lalu menjadi salah satu fitur pokok masyarakat di era posmodern ini, karena pada fondasionalisme narasi-narasi besar tersebutlah tujuan manusia di era sebelumnya (modern) menyandarkan keabsahannya.

Situasi ini menghadapkan manusia pada paradoks etis, dan sebagai konsekuensi juga paradoks etikopolitik. Dampak delegitimasi narasi-narasi besar pada paralogisme memudahkan jaminan kepastian tunggal yang bersifat ekstrateritorial, ekstraporal, apalagi universal, dalam arti sebagai eviden yang tak terkontestasi; dan sebaliknya merebakkan kemajemukan kemungkinan pilihan yang senantiasa berada dalam sirkuit kontestasi, sehingga mengandaikan dissensus laten. Landasan possibilities politik sebagai upaya koeksistensial manusia lalu beralih dari konsensus menjadi dissensus.

---

<sup>3</sup> Lyotard, Jean-Francois, (1996), *The Inhuman, Reflections of Time*, Stanford: Stanford University Press, pp. 43, 47-48.

<sup>4</sup> Tallis, Raymond, (1995), *Newton's Sleep, Two Cultures and Two Kingdoms*, New York: St. Martin Press, p. 211.

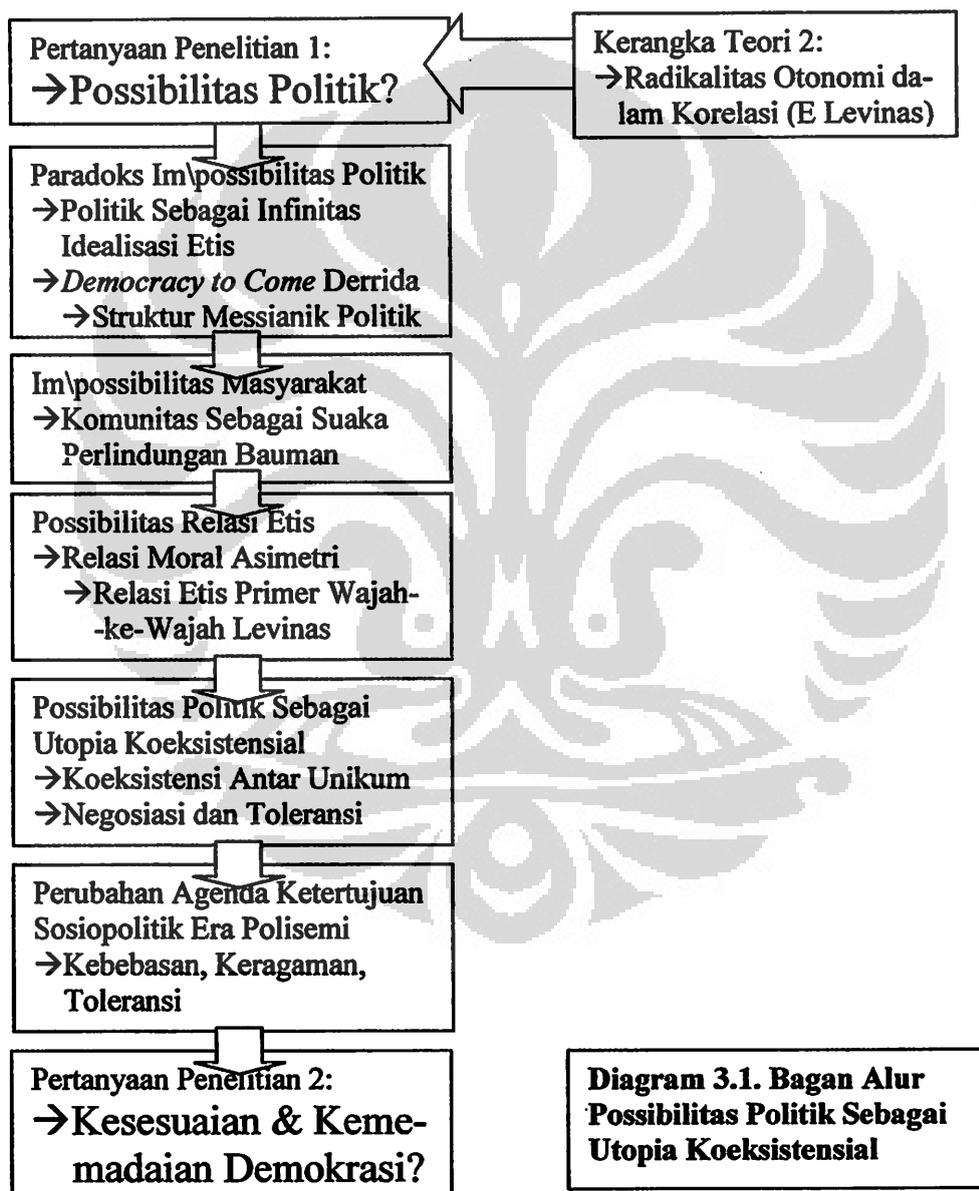
<sup>5</sup> Lyotard, (2001), op. cit., p. 4.

<sup>6</sup> Ibid., pp. 46-47.

Konsekuensinya, tatanan etik kolektif kehilangan possibilities, sehingga menghadapi manusia pada ambivalensi.<sup>7</sup> Inilah paradoks etikopolitik yang harus dihadapi politik sebagai utopia koeksistensial sadar dan sengaja untuk mengelola kebersamaan serta memaparkan tertib tertentu secara terarah jelas dan terencana sistematis di era ini.

### 3. Politik Sebagai Utopia Koeksistensial

#### 3.1. Bagan Alur Penelaahan Possibilitas Politik Sebagai Utopia Koeksistensial



<sup>7</sup> Bauman, Zygmunt, (1996), *Postmodern Ethics*, Oxford: Blackwell, p. 192; juga Bauman, Zygmunt, (1998), *Modernity and Ambivalence*, Cambridge: Polity Press, pp. 98, 231-235, 255.

### 3.2. Koeksistensi Antar Unikum: Utopia Koeksistensial dalam Paradigma Dissensus

Penyangatan paradoks etikopolitik akibat kelindan globalisasi dan delokalisasi mencemaskan para pihak karena berpotensi menghadirkan situasi etis parataksis pada interrelasi sosiopolitik. Entitas pertimbangan kolektif menjanjikan keteraturan hirarkhi interrelasi etis sehingga merupakan prasyarat koeksistensi sadar, sengaja, terarah jelas dan terencana sistematis lainnya politik. Oleh karena itu, delegitimasi entitas pertimbangan kolektif akibat paradoks bukan hanya berkonsekuensi pada impossibilitas politik sebagai utopia koeksistensial saja, melainkan juga pada impossibilitas relasi moral yang merupakan protolitik interrelasi etis lebih kompleks lainnya politik.

Meskipun demikian, lewat pemikiran para filsuf posmodern, khususnya Jacques Derrida, penelitian ini memperlihatkan bahwa penyangatan paradoks etikopolitik itu memang menuntut perubahan paradigma dalam memahami politik, namun sama sekali tak memunahkan possibilitasnya. Politik senantiasa mengandaikan infinitas idealisasi etis lantaran 'K'eadilan sebagai idealitas yang hendak diejewantahkan lewat setiap keputusan politik senantiasa memunculkan kesenjangan minimal pencapaian karena seolah selalu menanggukkan perwujudan optimalnya, sehingga radikalitas alteritas 'K'eadilan sebagai idealitas senantiasa tak terjembatankan.<sup>8</sup> Dalam konteks inilah, Derrida lalu mewacanakan politik sebagai demokrasi 'akan datang', karena mengandaikan possibilitas penyempurnaan yang tak kunjung berkesudahan akibat impossibilitas mencapai 'K'eadilan pada perwujudan optimalnya.<sup>9</sup> Sebagai demokrasi 'akan datang', politik lalu memiliki dimensi 'utopia', yang disebut Derrida sebagai struktur mesianik.<sup>10</sup>

Dalam kerangka struktur utopia ini, kecemasan mengenai impossibilitas politik menjadi tidak relevan lagi. Memang limit atas possibilitas politik menghadirkan keadilan pada keputusan-keputusannya menjadi setatar dengan 'K'eadilan pada perwujudan optimalnya merupakan impossibilitas politik menghadirkan obyektivitas sosial yang utuh-penuh-padu, namun justru lantaran impossibilitas itulah maka proses

<sup>8</sup> Derrida, Jacques, (1992), *Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority"*, dalam Drucilla Cornell et al. (ed.), *Deconstruction and the Possibility of Justice*, London: Routledge, pp. 16-17, 22-23; juga Derrida, Jacques, (1997), *Remarks on Deconstruction and Pragmatism*, dalam Mouffe, Chantal, (ed.), *Deconstruction and Pragmatism*, London: Routledge, pp. 86-87.

<sup>9</sup> Derrida, Jacques, (2000), *Politics of Friendship*, London: Verso, p. 306; juga lihat: Critchley, Simon, (1999), *Ethics-Politics-Subjectivity*, London: Verso, p.280.

<sup>10</sup> Derrida, (1997), op. cit., pp. 82-83; juga lihat: Flynn, Bernard, (2005), *The Philosophy of Claude Lefort: Interpreting the Political*, Evanston: Northwestern University Press, p. xv; juga: Critchley, ibid.

penyempurnaan politik tidak akan kunjung pernah tertuntaskan, sehingga kemungkinan politik sebagai upaya sadar dan sengaja mengelola kebersamaan agar semakin terarah jelas dan terencana sistematis lalu menjadi selalu terbuka. Possibilitas politik adalah impossibilitasnya, namun *vice versa*, impossibilitas politik adalah kemungkinan politiknya pula. Dalam kerangka demokrasi 'akan datang', kemungkinan politik justru menjadi terbuka; sehingga, yang dibutuhkan hanyalah perubahan paradigma dalam memahaminya: Politik harus lebih dipahami sebagai utopia koeksistensial ketimbang upaya koeksistensial.

Sementara itu, lewat pemikiran Emmanuel Levinas dan Zygmunt Bauman juga menjadi jelas bahwa meskipun paradigma polisemi mengakibatkan keniscayaan dissensus namun sama sekali tak memunahkan kemungkinan relasi etis. Delegitimasi entitas pertimbangan kolektif memang menimbulkan ketakpastian parataksis, namun justru menyangatkan kerinduan akan komunitas sebagai suaka perlindungan.<sup>11</sup> Menilik komunitas merupakan interrelasi kompleks segenap masing-masing individu di dalamnya terhadap segenap masing-masing liyannya, sementara keterhubungan seseorang dengan liyannya senantiasa berdimensi etis karena mengandaikan matra tanggung-jawab, maka kerinduan akan komunitas bukan hanya membuka peluang bagi relasi moral melainkan juga protolitik kemungkinan relasi etis dalam interrelasi lebih kompleks lainnya politik.

Memang, bersandar pada pewacanaan Levinas, relasi tanggung-jawab antara seseorang dengan liyannya tersebut bersifat terbatas karena bukan hanya sebatas relasi primer intersubjektif wajah-ke-wajah melainkan juga karena bersifat asimetri.<sup>12</sup> Relasi moral primer tersebut bersifat satu arah, karena tanggung-jawab keterhubunganku dengan liyan pada dasarnya tak menuntut baku tanggung-jawab keterhubungan liyan tersebut kepadaku. Keterhubungan-moralku kepadanya adalah fitrah etisku sendiri, seperti halnya keterhubungan-moralnya kepadaku adalah fitrah etisnya sendiri. Walau protolitik relasi moral ini tak menutup sama sekali peluang terjadinya keterhubungan dua arah, namun watak keterhubungan tersebut imbal-hubung dan bukannya baku-hubung. Betapapun, di tengah delegitimasi kepaduan etis, relasi moral asimetris ini setidaknya membuka peluang menyelamatkan kehidupan koeksistensial manusia dari relativisme etis.

<sup>11</sup> Bauman, (1998), *op. cit.*, pp. 246-247.

<sup>12</sup> Levinas, Emmanuel, (1995), *Totality and Infinity*, Pittsburgh: Duquesne University Press, Levinas, pp. 35, 216; juga: Emmanuel, (2000), *Ethics and Infinity*, Pittsburgh: Duquesne University Press, pp. 95-96, 98; cf: Hayat, Pierre, *Philosophy between Totality and Transcendence*, pengantar untuk Levinas, Emmanuel, (1999), *Alterity & Transcendence*, New York: Columbia University Press, p. xxi.

Gamblanglah, menilik acuan-nilai tak dapat lagi dikukuhkan pra-keputusan-nilai, sementara perbedaan antaralteritas yang muncul senantiasa tak tereduksikan, maka pemuasalan tanggung-jawab etis kepada segenap masing-masing individu ini sekaligus merupakan titik-tolak tuntutan akan pluralisme demokratis radikal. Penerimaan atas ketaktereduksian alteritas keliyanan agen sosial, membuat negosiasi sebagai praksis toleransi, dan toleransi sebagai modus operasional koeksistensi antar unikum, merupakan modus koeksistensi paling sesuai dan memadai guna menjawab tantangan polisemi, dissensus, dan paradoks ini.<sup>13</sup> Oleh karena itulah, kalau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan merupakan poros-poros ketertujuan sosiopolitik modernisme; maka kebebasan, keragaman, dan toleransi merupakan poros-poros ketertujuan sosiopolitik pada agenda politik era baru ini; agenda politik posmodernisme.<sup>14</sup>

<b>MODERN</b>	<b>POSMODERN</b>
<b>Kebebasan</b>	<b>Kebebasan</b>
<b>Persamaan</b> →Persamaan dalam kerangka kesetaraan normatif (Egalitarianisme), yakni bahwa setiap warga sebagai individu berkedudukan setara dalam hak dan kewajiban, semata karena kesamaannya sebagai manusia; sebagai satu-satunya pemegang hak-hak azasi dalam kehidupan (Humanisme Universal). →Keragamannya dalam kerangka persamaan, jadi meski kerangka simboliknya sudah Pluralisme, tapi berdasar rasionalitas normatif (kesamaan mahluk rasional-mandiri) sehingga bersifat terbatas. →Politik Pluralismenya lebih merupakan tanggapan akan 'fakta pluralisme' (pluralitas; kemajemukan bukan keragaman).	<b>Keragaman</b> →Persamaan dalam kerangka perbedaan, jadi lebih kesesamaan dissensual, karena menyadari ketaktereduksian alteritas keliyanan agen sosial mengakibatkan yang liyan takkan terleburkan menjadi yang sama. →Keragamannya dalam kerangka keterbukaan, karena radikalitas alteritas keliyanan mengakibatkan kemajemukan takkan berhenti menjadi sekedar kemajemukan melainkan selalu sekaligus menjadi keragaman, sehingga Pluralismenya menjadi terbuka karena mengidap infinitas kontingensi. →Politik Pluralismenya merupakan tanggapan akan radikalitas proliferasi pluralitas (polisemi dan bahkan paradoks).
<b>Persaudaraan</b> →Toleransi dalam kerangka persamaan, sehingga eksklusif konsensual, dalam arti toleransi sebatas sama-sama toleran, sebatas sama-sama rasional dan mandiri; sebatas pluralisme yang nalar (Rawls).	<b>Toleransi</b> →Toleransi dalam kerangka perbedaan agonistik, sehingga inklusif dissensual, dalam arti toleransi pada intoleransi artikulatif juga, namun seraya menggalang solidaritas hegemonis kesesamaan yang terbuka.

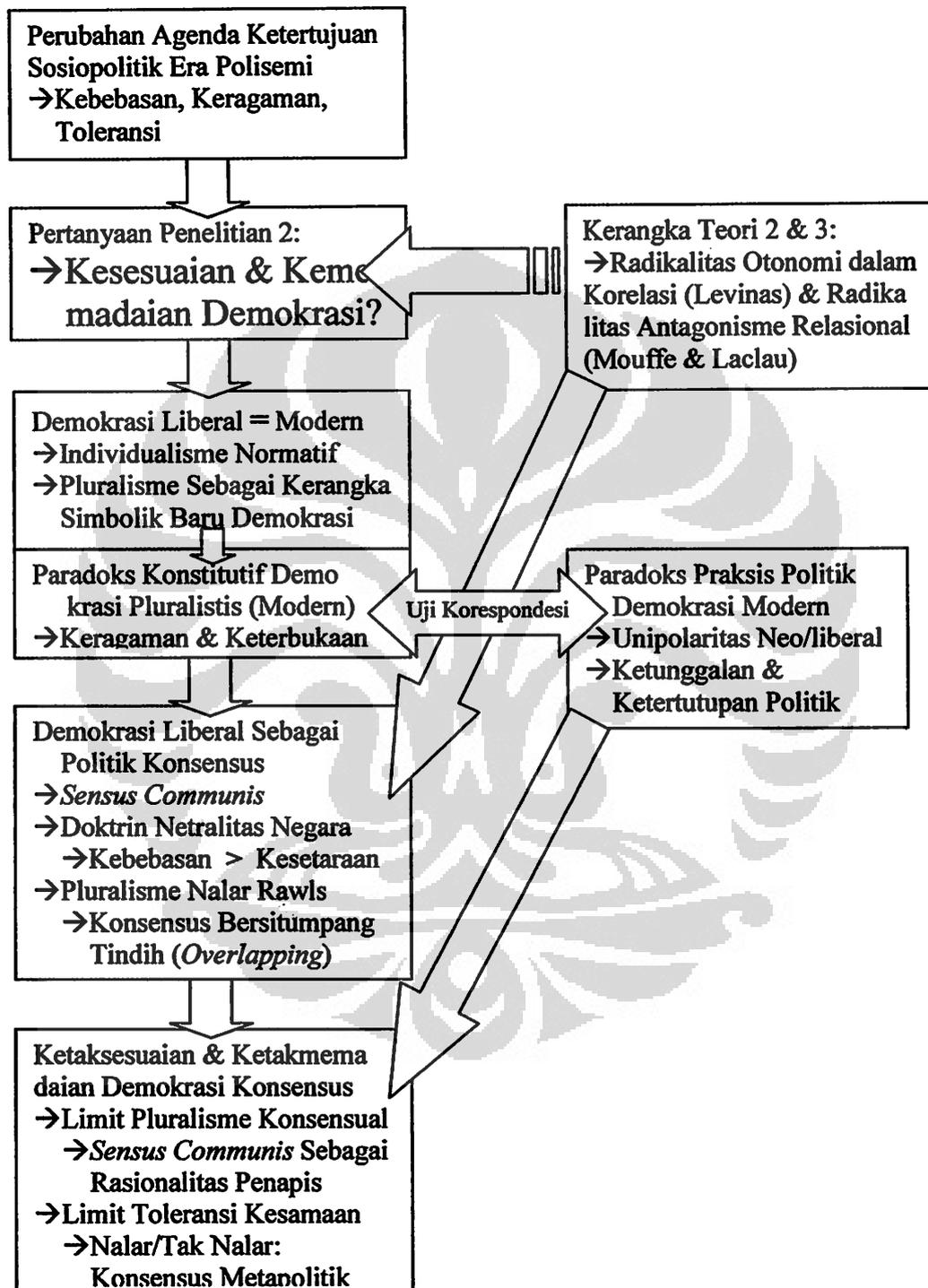
**Tabel 3.2. Perbandingan Agenda Ketertujuan Politik Era Modern dan Posmodern**

<sup>13</sup> Bauman, (1996), op. cit., pp. 183-184.

<sup>14</sup> Bauman, (1998), op. cit., p. 98.

#### 4. Demokrasi Sebagai Politik Konsensus: Konstitutivitas, Paradoks Praksis, dan Limitnya

##### 4.1. Bagan Alur Penelaahan Konstitutivitas, Paradoks Praksis, dan Limit Demokrasi Konsensus



**Diagram 4.1. Bagan Alur Penelaahan Konstitutivitas, Paradoks Praksis, dan Limit Demokrasi Konsensus**

#### 4.2. Paradoks Praksis Demokrasi Modern: Limit Kelenturan Artikulatif Politik Konsensus

Menilik dominasinya pada praksis politik-ekonomi global dewasa ini, uji kesesuaian dan kememadaian politik demokrasi terhadap agenda ketertujuan sosiopolitik baru dimulai dengan telaah atas kemungkinan dan limit dari demokrasi liberal. Telaah pertama-tama memperlihatkan bahwa artikulasi liberal pada pewacanaan demokrasi modern membuat pluralisme menjadi kerangka simbolik barunya.<sup>15</sup> Kesadaran akan keniscayaan kemajemukan ini melahirkan doktrin netralitas negara. Negara berkewajiban netral terhadap anasir-anasir doktriner dalam masyarakat, dengan cara mengutamakan ‘yang hak di atas yang baik’ dengan membuat ‘tembok pemisah’ ranah publik dan ranah privat; dalam arti mengutamakan pengaturan yang hak dalam ranah publik dan membiarkan ‘yang baik’ menjadi urusan pribadi masing-masing warga di ranah privat.<sup>16</sup>

Menyadari praksis politik membutuhkan landasan bersama (publik) sehingga mengandaikan preferensi nilai tertentu, Liberalisme politik lebih mutakhir dari John Rawls berusaha membangun konsep keadilan politik –keadilan sebagai kewajaran– lewat ‘konsensus yang bersitumpang-tindih’ dari kemajemukan anasir doktriner dalam masyarakat.<sup>17</sup> Betapapun, menyadari impossibilitas konsensus yang betul-betul utuh karena ketakterbatasan spektrum kemajemukan masyarakat, maka mufakat politik itu dibatasi ‘pluralisme yang nalar’; jadi, hanya mencakup anasir doktriner yang nalar saja.<sup>18</sup>

Pembatasan ini memang lebih memungkinkan pencapaian ‘konsensus’, namun dalam pengertian tertentu menjadi tidak netral.<sup>19</sup> Kategorisasi antara yang nalar dan yang tidak nalar pada dasarnya sudah melakukan penggardaan karena mengandaikan kriteria berdasarkan tatanan nilai tertentu. Dengan demikian, konsensus bersitumpang-tindih tersebut sesungguhnya bukanlah konsensus politik melainkan konsensus (meta)politik.<sup>20</sup> Sirkuit penalaran tertutup antara pluralisme yang nalar dengan prinsip Liberalisme politik

<sup>15</sup> Mouffe, Chantal, (1993), *The Return of the Political*, London: Verso, pp. 120-122; juga Mouffe, Chantal, (1996), *Democracy, Power, and the "Political"*, dalam Seyla Benhabib, (ed.), *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political*, New Jersey: Princeton University Press, pp. 245-246.

<sup>16</sup> Christman, John, (2002), *Social and Political Philosophy, A Contemporary Introduction*, London: Routledge, p. 98; juga lihat: Mouffe, (1993), *ibid.*, pp. 135-137.

<sup>17</sup> Rawls, John, (2000), *A Theory of Justice*, Oxford: Oxford University Press, p. 340; juga Rawls, John, (2001), *The Idea of an Overlapping consensus* dan *The Domain of the Political and Overlapping consensus*, dalam *Collected Papers*, Cambridge: Harvard University Press, p. 421 dan 473n.

<sup>18</sup> Rawls, John, (1996), *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, pp. 36-37, 144.

<sup>19</sup> Mouffe, (1993), *op. cit.*, pp. 135-136; cf. Rawls, *ibid.*, p. 192.

<sup>20</sup> Bellamy, Richard, (1999), *Liberalism and Pluralism, Towards A Politics of Compromise*, London: Routledge, pp. 46-51.

sebagai acuan 'tersembunyinya', membuat penggardaan ini gampang terpeleset menjadi kategorisasi untuk mengelompokkan penganut Liberalisme politik pada gugus mereka yang nalar dan karena itu layak ikut dalam proses pengambilan mufakat politik, sementara mereka di seluar penganut Liberalisme politik sebagai tidak nalar sehingga tidak layak dan karena itu juga tidak perlu dilibatkan dalam proses konsensus tersebut.<sup>21</sup>

Penggardaan ini memperlihatkan limit kelenturan artikulatif pluralisme dan toleransi dari politik demokrasi liberal dalam menjawab tuntutan radikalisisasi pluralisme demokratis berserta toleransi inklusifnya. Komplikasi ini juga menggambarkan persoalan doktrin netralitas negara akibat 'rasionalitas' penapis terselubungnya. Assumsi antropologis di balik keyakinan terselubung ini ialah possibilitas *sensus communis* berlandaskan rasionalitas individualisme normatif, yakni bahwa konsensus berkemungkinan dicapai karena adanya *sensus communis* (citarasa bersama); dan *sensus communis* berkemungkinan dicapai karena kesamaan otonomi kreatif manusia sebagai mahluk rasional akan membuat manusia *ipso facto* cenderung memberikan tanggapan yang sama jika dihadapkan pada keadaan yang secara hipotetis identik sejauh tidak ada faktor-faktor yang membiaskan pilihan rasional mereka.<sup>22</sup> Oleh karena itu, limit politik demokrasi liberal merupakan limit paradigma politik konsensus pada umumnya pula.

Selanjutnya, di samping radikalisisasi akibat pluralisme, konvergensi tradisi demokrasi dengan wacana liberal juga mengakibatkan radikalisisasi akibat paradoks konstitutif antaridealitasnya. Kesetaraan liberal yang berdasarkan pengakuan hak-hak individu sebagai hak azasi manusia --individualisme normatif-- lebih bersifat moral sehingga mengandung retorika universal, tak terbatas lingkup; sementara kesetaraan demokrasi yang berdasarkan pengakuan kedaulatan orang banyak sebagai *demos* --*isonomia*-- lebih bersifat politis karena hanya berlaku dalam daulat *demos* tertentu, sehingga cenderung spasiotemporal, mempunyai lingkup terbatas. Paradoks konstitutif ini membuat possibilitas realisasi artikulatif demokrasi modern yang *notabene* demokrasi liberal menjadi tak kunjung berkesudahan, karena baku gugat antar kedua idealitasnya tersebut mengakibatkan tingkap maknanya menjadi senantiasa terbuka.<sup>23</sup> Dengan begitu, kedua radikalisisasi itu mengidapkan keterbukaan konstitutif pada demokrasi modern,

<sup>21</sup> Mouffe, op. cit., pp. 249-250.

<sup>22</sup> Rescher, Nicholas, (1995), *Pluralism: Against the Demand for Consensus*, Oxford: Oxford University Press, pp. 10n, 191.

<sup>23</sup> Mouffe, Chantal, (1999), *Carl Schmitt and the Paradox of Liberal Democracy*, dalam Chantal Mouffe, (ed.), *The Challenge of Carl Schmitt*, London: Verso, pp. 43-44.

sehingga di satu sisi memiliki dinamika kreatif untuk senantiasa memperbaiki artikulasi diri, namun di sisi lain justru senantiasa mengandaikan kehadiran perbedaan, dissensus, dan antagonisme antar para pihaknya agar ketegangan kreatif ini dapat tetap terjaga. Oleh karena itu, unipolaritas tanpa gugatan Neo/liberalisme akibat tersingkirnya Komunisme, meredupnya Sosialisme, dan menengahnya Sosial Demokrat, menghadapkan demokrasi modern pada paradoks praksis: konstitutivitas keterbukaan keragaman di tengah ketunggalan penutupan politik. Situasi politik tanpa lawan ini berbahaya bagi perkembangan demokrasi karena bertentangan dengan paradoks konstitutifnya tersebut.<sup>24</sup>

Ketakesesuaian dan ketakmemadaiannya politik konsensus menjawab tuntutan pluralisme yang lebih demokratis dan toleransi yang lebih inklusif juga merupakan penalaran di balik kegagalan politik pemusatan kekuasaan mantan Presiden Suharto dengan rezim Orbanya; walaupun tentu saja dalam perwujudan lebih eksekutif. Lewat pemberhalaan konsensus nasional berdasarkan azas tunggal, dan sebaliknya penyingkiran oposisi, politik *bunder kepleng* Orba melakukan sentralisasi kuasa secara eksekutif sehingga menguras habis mekanisme sisip, kritik dan kontrol sebagai dinamika kreatif politik masyarakat. Pers diberangus, perwakilan rakyat dikebiri, serta kehidupan kampus, serikat buruh, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai kantong-kantong kekuatan masyarakat madani dikooptasi. Anasir perbedaan dan keragaman artikulatif yang semestinya perlu dikontestasikan di ruang publik justru ditindas habis, baik secara legal-politik lewat pemberlakuan azas tunggal, secara kultural-simbolik lewat hegemoni makna seperti pewacanaan ketiadaan budaya oposisi dan mistifikasi keunggulan harmoni, atau bahkan secara koersif seperti penggunaan kekuatan polisi dan militer untuk menindas aksi protes, demonstrasi maupun keresahan sosial-politik lainnya.

Betapapun, keruntuhan Orba menggamblangkan bahwa perbedaan dan keragaman, termasuk perwujudan konflikturnya seperti dissensus dan antagonisme, tak terhindarkan dalam politik, sehingga hanya mungkin dikelola dalam koridor demokrasi. Apabila disingkirkan dari ruang politik, apalagi ditindas sepihak dengan kekerasan, perbedaan dan dissensus bisa bertiwikrama mengambil bentuk lain yang justru lebih tak terkendali, seperti rangkaian kerusuhan SARA menjelang dan mengawali Reformasi 1998 yang meluluh-lantakkan imajineri konsensus dari politik idolatri harmoni Orba.

<sup>24</sup> Mouffe, Chantal, (2005), *On the Political*, London: Routledge, pp. 2, 64-69; juga Mouffe, Chantal, (2000), *The Democratic Paradox*, London: Verso, pp. 80, 108-112.

## 5. Demokrasi Sebagai Politik Dissensus: Peluang dan Tantangan Koeksistensi di Era Polisemi dan Paradoks

### 5.1. Bagan Alur Penelaahan Peluang dan Tantangan Demokrasi Dissensus di Era Polisemi dan Paradoks

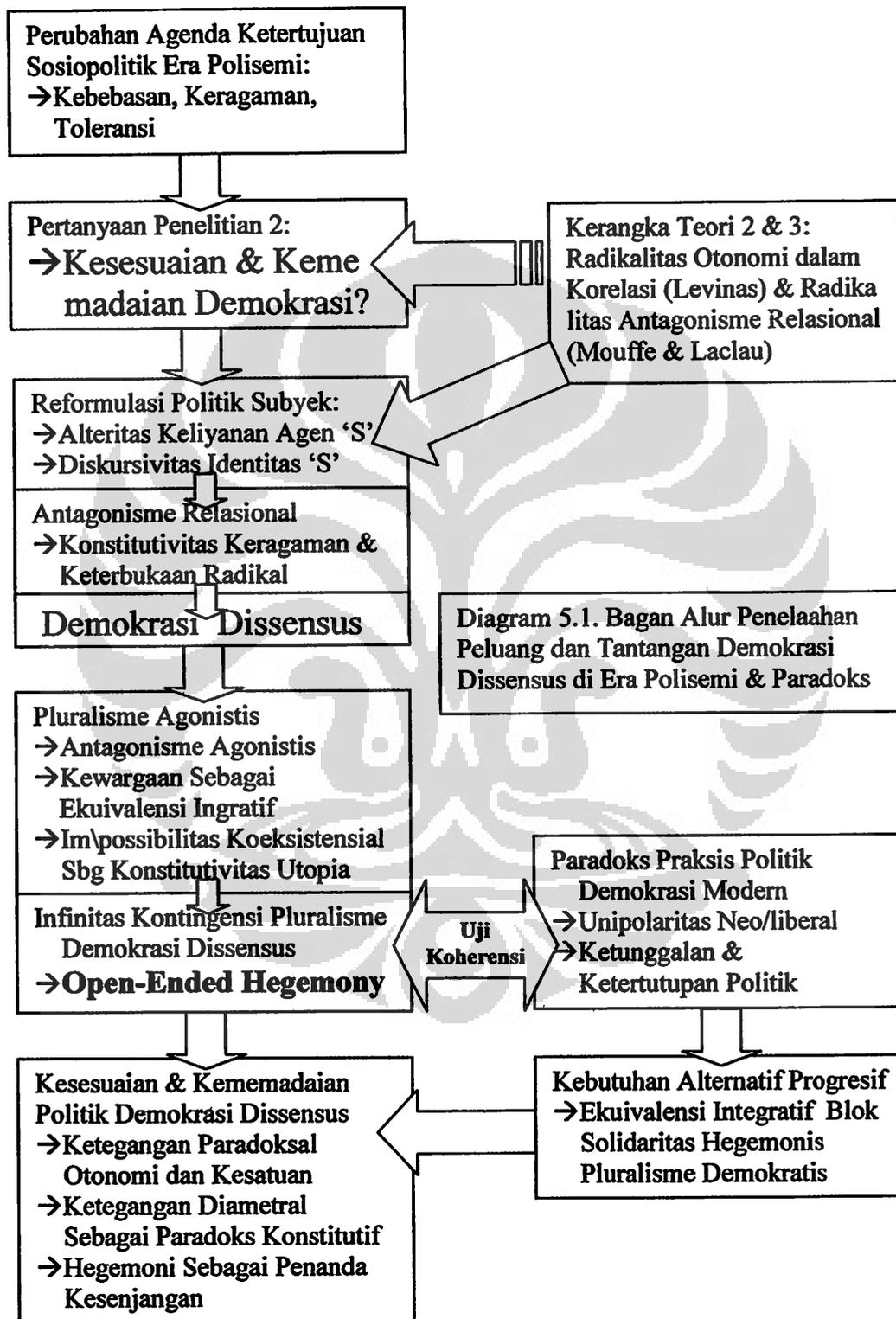


Diagram 5.1. Bagan Alur Penelaahan Peluang dan Tantangan Demokrasi Dissensus di Era Polisemi & Paradoks

## 5.2. Kesesuaian dan Kememadaian Politik Demokrasi Dissensus Terhadap Konsekuensi Radikalisasi Polisemi dan Paradoks

Kegagalan demokrasi liberal memahami distingsi politik merupakan konsekuensi konstitutif asumsi antropologis paradigma konsensus di baliknya, yang terlalu percaya pada kemungkinan *sensus communis*, sehingga luput menyadari radikalitas alteritas dan diskursivitas keliyanaan segenap masing-masing individu sebagai agen sosial. Oleh karena itu, dalam rangka meradikalisasi politik demokrasi pluralis agar lebih sesuai dan memadai dengan perubahan ketertujuan sosiopolitik era ini --khususnya keragaman yang lebih demokratis dan toleransi yang lebih inklusif-- asumsi antropologisnya perlu direformulasi dalam paradigma dissensus, yang lebih radikal dalam menerima ketaktereduksian alteritas dan diskursivitas keliyanaan agen sosial.

Lewat asumsi antropologis bahwa setiap agen sosial merupakan unikum yang memiliki alteritas perbedaan yang tak terjembatankan dalam korelasi, kita lalu menyadari bahwa keterhubungan antaragen sosial senantiasa ditandai distansi proksimitas,<sup>25</sup> karena kedekatan kesesamaan kita tetap menyisakan ketakterjembatanan jarak akibat ketaktereduksian alteritas keliyanaan kita masing-masing.<sup>26</sup> Sementara, lewat asumsi antropologis bahwa setiap 'subyek' sebagai identitas sosial selalu dibentuk oleh 'seberang konstitutifnya', sehingga lebih merupakan pemampatan rangkaian posisi-posisi subyek yang tidak akan kunjung pernah terkonstruksi menjadi entitas sosial yang utuh-penuh-padu,<sup>27</sup> kita lalu juga menyadari bahwa keterhubungan antaragen sosial senantiasa ditandai diskursivitas yang tak tereduksikan pula karena senantiasa menjejakkan rongrongan eksternalitas artikulatif dari para liyan sebagai seberang konstitutif.<sup>28</sup> Kedua reformulasi politik subyek ini mengerucutkan ketaktereduksian alteritas dan diskursivitas keliyanaan agen sosial sehingga upaya koeksistensial apapun senantiasa mengandaikan keragaman radikal karena keniscayaan anasir-anasir perbedaan, dissensus, dan antagonisme relasional dalam entitas sosialnya.

Penerimaan atas konstitutivitas antagonisme relasional berkonsekuensi pada 'impossibilitas masyarakat': konstitusi-diri masyarakat sebagai sebuah entitas sosial

<sup>25</sup> Levinas, (1999), op. cit., pp. 93-94.

<sup>26</sup> Levinas, (1995), op. cit., pp. 36, 102, 251.

<sup>27</sup> Laclau, Ernesto, dan Mouffe, Chantal, (1994), *Hegemony & Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics*, London: Verso, pp. 114-122.

<sup>28</sup> Laclau, Ernesto, (1990), *New Reflections on the Revolution of Our Time*, London: Verso, pp. 31-32; juga Mouffe, (1996), p. 247; cf. Howarth, David, (2000), *Discourse*, Buckingham: Open University Press, pp. 105-106.

senantiasa takkan kunjung pernah utuh-penuh-padu karena akan senantiasa diwarnai ketegangan paradoksal in\|determinasi.<sup>29</sup> Oleh karena itu, reformulasi politik subyek tersebut lalu mengerangkakan sebuah politik demokrasi pluralis yang bukan hanya menyadari radikalitas alteritas perbedaan, beserta konsekuensinya pada ketakterreduksian keragaman dan keniscayaan dissensus saja, melainkan juga menyadari radikalitas diskursivitas identifikasi-diri agen sosial maupun konstitusi-diri masyarakat, beserta konsekuensinya pada paradoks dan kontingensi sebagai limit realisasi upaya koeksistensial.<sup>30</sup> Dalam konteks inilah, politik demokrasi pluralis dalam paradigma dissensus tersebut lalu mengandaikan politik keragaman dan keterbukaan yang radikal.

Dengan demikian, politik demokrasi dissensus harus menyadari bahwa sebagai dimensi antagonisme dari politik, 'politik' merupakan konstitutivitasnya pula. Oleh karena itu, politik demokrasi dissensus harus senantiasa merawat medan politikalnya agar tetap menjadi 'ruang kosong', sehingga memungkinkan segenap artikulasi sosiopolitik berkontestasi untuk ikut memberikan aksentuasi pada imajineri kolektif sebuah masyarakat; dalam hal ini, walaupun terjadi stabilisasi makna atau hegemoni kuasa di sana, tetaplah harus senantiasa disadari sebagai parsial dan temporal.<sup>31</sup>

Akan tetapi, meskipun menyadari antagonisme relasional merupakan konstitutivitas politik, dan sekaligus merupakan sumber dinamika ketegangan kreatifnya, politik demokrasi dissensus juga harus menyadari bahaya membiarkan antagonisme berkembang liar tak terkendali. Dalam konteks inilah, Pluralisme Agonistis merupakan perwujudan politik keragaman paling sesuai dan memadai bagi politik demokrasi dissensus, karena memanjajemi antagonisme relasional dalam ketegangan radikalisasi\|domestikasi, dalam arti tak menumpas habis tapi juga tak membiarkan perbedaan dan dissensus berkembang menjadi liar tak terkendali, melainkan senantiasa bersusah-payah mengoridori mereka dalam idealitas-idealitas demokrasi pluralistis sehingga menjadi antagonisme yang lebih agonistis.<sup>32</sup> Dalam hal ini, lawan dalam distingsi oposisional kawan/lawan dengan susah-payah senantiasa dibesut menjadi sekedar seteru (*friendly enemy*) –sebuah metaksi yang mengandung artikulasi kawan

<sup>29</sup> Laclau dan Mouffe, op. cit., pp. 110-111, 125, 127; juga Laclau, (1990), op. cit, pp. 91-92.

<sup>30</sup> Laclau, Ernesto, (2007), *Emancipation(s)*, London: Verso, p. 59-60; juga Laclau, (1990), op. cit., pp. 31-33.

<sup>31</sup> Laclau dan Mouffe, op. cit., pp. 186-187.

<sup>32</sup> Mouffe, (2005), op. cit., pp. 20-21; juga Mouffe, (2000), op. cit., 103.

karena berbagi ruang simbolik yang sama, namun juga sekaligus artikulasi lawan karena ingin mengelola ruang simbolik tersebut dengan cara mereka sendiri.<sup>33</sup>

Dalam kerangka ketegangan paradoksal antara ekuivalensi integratif --keperluan penggalangan/pengkoridoran-- dan differensiasi-differensiasi partikular --keniscayaan desentralisasi/otonomisasi-- tersebut, kewargaan lebih dipandang sebagai sekedar prinsip pengartikulasian yang di satu sisi menjadi koridor artikulatif sehingga mempengaruhi posisi-posisi subyek berbeda dari masing-masing warga sebagai agen sosial, namun di sisi lain juga tetap memberi keleluasaan artikulatif terhadap idealitas-idealitas khusus tertentu lain, sebagai penghormatan atas kemerdekaan individual, sebagai keterbukaan terhadap differensiasi-differensiasi partikular akibat keragaman, sebagai kesadaran atas keniscayaan dissensus.<sup>34</sup> Kewargaan lalu lebih merupakan identitas politik bersama dari individu-individu bebas dan mandiri yang mengikatkan diri dalam kebersamaan pengakuan atas seperangkat nilai-nilai etikopolitik yang sama sebagai konsekuensi identifikasi sosiopolitik atas *respublica* yang sama; namun, tanpa mengurangi keunikan atau mengecilkan otonomi mereka masing-masing.<sup>35</sup>

Pengakuan atas konstitutivitas antagonisme relasional ini membuat politik demokrasi dissensus menerima ketaktertuntasan ketegangan paradoksal in\determinasi pada setiap upaya koeksistensial, sehingga menyadari paradoks im\possibilitas masyarakat, sehingga menyadari kontingensi sebagai limit dari politik sebagai realisasi sosiabilitas masyarakat. Radikalitas keterbukaan politik keragaman inilah yang membuat politik demokrasi dissensus terbukti bukan hanya sesuai dan memadai guna menghadapi konsekuensi artikulatif radikalisis proliferasi pluralitas dewasa ini, seperti terrangkum pada perubahan agenda ketertujuan sosiopolitik global, melainkan juga guna menghadapi konsekuensi praksis-politis fenomena polisemi, yakni di satu sisi perebakan gerakan-gerakan sosial baru, sementara di sisi lain unipolaritas tertib politik-ekonomi global di bawah hegemoni tunggal ideologis dan tanpa seteru Neo/liberalisme.

Kedua konsekuensi praksis-politis perubahan faktisitas sosiopolitik global tersebut bermuara pada kebutuhan artikulatif yang sama, yakni mengisi kelowongan alternatif progresif untuk menghadapi hegemoni Neo/liberalisme akibat demoralisasi

<sup>33</sup> Mouffe, (2000), *ibid.*, p. 13.

<sup>34</sup> Mouffe, Chantal, *Democratic Citizenship and the Political Community*, dalam Mouffe, Chantal, (ed.), (1995), *Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community*, London: Verso, p. 234; juga Mouffe, (1993), *op. cit.*, p. 84.

<sup>35</sup> Mouffe, (1995), *ibid.*, p. 235-236.

politik Kiri, guna menghidupkan kembali dinamika ketegangan kreatif politik global yang mengalami pengaburan distingsi politik akibat pelemahan antagonisme relasional. Pertanyaan praksis-politisnya lalu menyangkut kesesuaian dan kememadaian perluasan perannya menjadi ekuivalensi integratif bagi blok solidaritas hegemonis gerakan-gerakan sosial baru dalam menghadapi hegemoni tersebut.<sup>36</sup> Lewat tiga uji keruntutan konseptual atas strategi hegemonis blok solidaritas demokrasi pluralis radikalnya, politik demokrasi dissensus terbukti sesuai dan memadai untuk menjalankan peran ekuivalensial itu tanpa harus mengorbankan idealitas-idealitas konstitutifnya sendiri, yakni ketegangan paradoksal antara kebebasan dan kesetaraan, yang berkonsekuensi pada tuntutan akan politik keragaman yang lebih sadar kontingensi, dalam arti meniscayakan pengakuan perbedaan, penerimaan keragaman, serta perayaan keterbukaan.

Pertama, radikalitas kontingensi pada logika konstitutif politik demokrasi dissensus membuat kesatuan --konsekuensi kebutuhan praksis penggalangan blok solidaritas hegemonis-- dan otonomi --konsekuensi kebutuhan konstitutif pluralisme radikal paradigma dissensus-- bukanlah sasaran yang saling bertentangan melainkan perkelindanan ketegangan paradoksal in\determinasi setiap upaya koeksistensial yang bersifat konstitutif. Kalaupun sempat tergalang stabilisasi kuasa akibat penggalangan kesatuan tersebut, 'hegemoni' yang terbentuk tetap senantiasa terkepung kesalingan artikulatif antarartikulasi, sehingga selalu tetap berada dalam ketegangan in\determinasi dari kontingensi dan karena itu senantiasa bersifat sebahagian dan sementara, sehingga takkan kunjung pernah mengonstruksi formasi sosiopolitik sebagai sebuah obyektivitas sosial yang utuh-penuh-padu, sehingga jauh dari kemungkinan totalitas dominasi.<sup>37</sup>

Kedua, berbagai ketegangan diametral dalam struktur konseptual politik demokrasi dissensus, misalnya seperti in\possibilitas konstitusi-diri masyarakat, in\determinasi kontingensi utopia koeksistensial, universalisasi\otonomisasi dan ekuivalensi integratif\differentiasi partikular pada manajemen pergerakan demokratisasi, radikalisasi\domestikasi pada manajemen antagonisme relasional, maupun kebebasan\kesetaraan dan moral\politik pada konvergensi idealitas-idealitas politik demokrasi pluralis radikal, bukan dipahami sebagai oposisi nyata atau kontradiksi, melainkan lebih sebagai paradoks konstitutif akibat keniscayaan antagonisme

<sup>36</sup> Laclau dan Mouffe, *op. cit.*, p. 179.

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 182; juga lihat: Smith, Anna Marie, (1998), *Laclau and Mouffe: The Radical Democratic Imaginary*, London: Routledge, p. 32.

relasional.<sup>38</sup> Dengan demikian, ketegangan diametral tersebut bukan merupakan hambatan realisasi koeksistensial, melainkan lebih sebagai limitnya, yang karena menggardakan impossibilitas keutuh-penuh-paduan realisasi politik menggalang kebersamaan maka lalu justru sekaligus membuka possibilities untuk terus-menerus menafsirkan dan mengejantahkannya kembali.

Ketiga, betapapun memposisikan politik pluralisme demokrasi dissensus sebagai ideologi payung (*umbrella discourse*) bagi gerakan-gerakan sosial baru memang mengandaikan sebuah tindak hegemoni, namun tak bertentangan dengan idealitas-idealitas pluralisme demokratisnya karena pengakuan atas ketaktereduksian antagonisme relasional membuat politik keragamannya senantiasa mengidap keterbukaan radikal lantaran menyadari ketegangan paradoks in\determinasi setiap formasi sosial.<sup>39</sup> Dalam kerangka paradoks in\determinasi, stabilisasi kuasa disadari takkan pernah mungkin mencapai obyektivitas sosial karena senantiasa dirongrong luapan determinasi akibat artikulasi-artikulasi pergulatan kuasa tak berketuntasan. Dengan demikian, hegemoni lalu sekedar merupakan penanda kesenjangan (*signifier of the lack*), dalam arti hanyalah sebuah kesesaatan dalam rangkaian stabilisasi kuasa untuk memenuhi kekosongan ruang politikal, karena kekosongan tersebut takkan kunjung pernah sungguh terpenuhi akibat ketaktereduksian antagonisme relasional di dalamnya.<sup>40</sup> Gambangnya, hegemoni disebut sebagai 'penanda kesenjangan' lantaran bukan hanya menandakan sebuah kekosongan ruang politikal di dalam dirinya saja, melainkan juga menandakan kesenjangan konstitutif antara infinitas ketaktertimbunan ruang kosong pada sebuah medan politikal dengan 'realitas' rangkaian upaya artikulatif untuk menimbuninya yang betapapun terbukti akan selalu parsial dan temporal namun juga senantiasa meninggalkan jejak keterlibatan politik. Oleh karena itu, dalam kerangka hegemoni sebagai sekedar penanda kesenjangan, kekhawatiran akan totalitas dominasi yang menindas habis differensiasi-differensiasi partikular, dan karena itu bertentangan dengan idealitas-idealitas demokrasi pluralis radikal laiknya politik demokrasi dissensus, menjadi kehilangan relevansinya pula.

<sup>38</sup> Laclau dan Mouffe, op. cit., p. 125; Smith, ibid., pp. 185-186.

<sup>39</sup> Laclau, Ernesto, (2000), *Identity and Hegemony: The Role of Universality in the Constitution of Political Logics, dan Structure, History and the Political*, dalam Judith Butler, Ernesto Laclau, dan Slavoj Zizek, *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*, London: Verso, pp. 54-56 dan 207-209; juga Laclau dan Mouffe, ibid., pp. 135-136.

<sup>40</sup> Laclau, (2007), op. cit., p. 44; juga Laclau, (2000), ibid., pp. 57, 210-211.

Keluaran Politik ( <i>Political Output</i> )	Konsensus Terbuka Tak Berakhir ( <i>Open-Ended Consensus</i> )	Hegemoni Terbuka Tak Berakhir ( <i>Open-Ended Hegemony</i> )
Paradigma Politik → Asumsi Antropologis → Suposisi Koeksistensial	Pluralisme Demokrasi Konsensus → Rasionalitas Individualisme Normatif → Korelasi Konsensual Antar Sesama Rasional-Mandiri → <i>Sensus Communis</i>	Pluralisme Demokrasi Dissensus → Radikalitas Otonomi dalam Korelasi → Koeksistensi Dissensual Antar Sesama Unikum → <i>Dissensus Communis</i>
Utopia Modus Koeksistensial	→ Konsensus  → Upaya Koeksistensial	→ Ketegangan Paradoksal Dissensus/Konsensus → Utopia Koeksistensial
Rasionalitas Koeksistensial	Rasional Normatif → Kebutuhan Tataran Rasionalitas Lebih Tinggi	Praktis-Pragmatis → Keterpaksanaan Spasiotemporalitas Desisionisme Politik
Proses Politik	Kesepakatan Konsensual → Kontingensi Konsensus Deliberatif	Stabilisasi Kuasa → Kontingensi Relasi Kuasa Dissensual
Praksis Metodis	Deliberasi → Terus-Menerus Berhati-hati Merundingkan → Memaksimalisasi Para Pihak yang Setuju → Meningkatkan Kualitas Kesepakatan Prosedural	Agoni → Terus-Menerus Bersusah-Payah Memperjuangkan → Meminimalisasi Para Pihak yang Tidak Setuju → Mengoridori Ketaksetujuan Ekstrem dalam Idealitas Demokrasi Agar Tidak Liar Tak Terkenali
Spasiotemporalitas Keluaran	Sementara → Sebatas Spasiotemporalitas Konsensus	Sebahagiaan dan Sementara → Sebatas Spasiotemporalitas Hegemoni

**Tabel. 5.2. Perbandingan Ketak\serupaan Keluaran (*Output*) Politik Antara Pluralisme Demokrasi Konsensus dan Pluralisme Demokrasi Dissensus**

## 6. Kesimpulan, Kontekstualitas, dan Kontribusi Penelitian

### 6.1. Kesimpulan

Pertama, konsekuensi konstitutif delokalisasi dan detemporalisasi informasi, pengetahuan, serta kebudayaan pada paralogisme narasi-narasi kecil era telekoinonia dewasa ini memang mengakselerasi radikalitas proliferasi pluralitas sehingga mengakibatkan delegitimasi entitas pertimbangan kolektif. Meskipun demikian, delegitimasi tersebut terbukti sama sekali tak memunahkan kemungkinan politik sebagai koeksistensi sadar, sengaja, terarah jelas, dan terencana sistematis, yang dengan sendirinya membutuhkan tatanan nilai suprakomunal semacam itu, asalkan kita bersedia membuka diri terhadap perubahan paradigma dalam memahami dan menerapkannya. Dalam hal ini, politik harus lebih dipahami sebagai utopia koeksistensial ketimbang upaya koeksistensial, karena lebih merupakan infinitas idealisasi etis, lebih merupakan

Universitas Indonesia

rangkaian pengejawantahan berkesinambungan tak berkesudahan idealitas koeksistensial tertentu, lantaran takkan kunjung pernah tertuntaskan secara utuh-penuh-padu.

Walaupun delegitimasi entitas pertimbangan kolektif membuat politik tertepiskan dari possibilities menghadirkan obyektivitas sosial --tataran masyarakat sebagai entitas kolektif yang utuh-penuh-padu-- namun justru membuka peluangnya untuk bisa terus menerus tak berkesudahan melakukan rekonstruksi koeksistensial agar semakin mendekati idealitasnya. Menilik ketegangan im\possibilities tak berkesudahan infinitas idealisasi koeksistensial tersebutlah maka politik seyogyanya tak lagi dipahami sebagai obyektivikasi sosial pengorganisasian koeksistensial manusia untuk mencapai harmoni melainkan lebih sebagai sebuah utopia koeksistensial untuk mengelola ketaktertuntasan dissensus sebagai konsekuensi konstitutif penerimaan atas ketakterreduksian alteritas dan diskursivitas keliyaran agen sosial dalam setiap interrelasi sosial.

Kedua, pengembalian fitrah etis --kebebasan dan tanggung-jawab memilih-- kepada segenap masing-masing manusia sebagai pribadi bukan hanya merupakan pengakuan bahwa acuan-nilai tak dapat lagi dikukuhkan pra-keputusan-nilai, melainkan juga sekaligus merupakan penerimaan atas ketaktertampikan pluralisme demokratis radikal. Penerimaan atas ketakterreduksian alteritas, maupun dissensus laten yang ditimbulkannya, sebagai konsekuensi konstitutif pengakuan atas ketaktertampikan pluralisme demokratis radikal tersebut, membuat negosiasi sebagai praksis toleransi, dan toleransi sebagai modus operasional koeksistensi antar unikum, merupakan praksis koeksistensi paling sesuai dan memadai untuk menjawab tantangan paradigma polisemi dan paradoks ini. Oleh karena itulah, kalau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan merupakan poros-poros ketertujuan sosiopolitik era modernisme; maka kebebasan, keragaman, dan toleransi merupakan poros-poros ketertujuan sosiopolitik era baru ini, era posmodernisme. Dengan demikian, sistem politik apapun yang mencoba menjawab tantangan perubahan faktisitas sosiopolitik global ini haruslah memiliki kelenturan artikulatif untuk beradaptasi dengan ketiga poros ketertujuan sosiopolitik baru tersebut.

Ketiga, walaupun sudah menempatkan pluralisme sebagai kerangka simboliknya, demokrasi liberal sebagai politik demokrasi dalam paradigma konsensus yang mendominasi praksis politik-ekonomi global dewasa ini ternyata tak cukup progresif sehingga kurang sesuai maupun memadai untuk menjawab tuntutan perubahan faktisitas sosiopolitik global itu. Politik keragamannya bersifat terbatas karena mengidap

Universitas Indonesia

'rasionalitas' penapis terselubung, yakni kemungkinan *sensus communis* (citarasa bersama) berlandaskan rasionalitas individualisme normatif. Dalam rasionalitas tersebut, *sensus communis* berkemungkinan dicapai karena kesamaan otonomi kreatif manusia sebagai individu rasional dan mandiri akan membuat manusia *ipso facto* cenderung memberikan tanggapan yang sama jika dihadapkan pada keadaan yang secara hipotetis identik sejauh tidak ada faktor-faktor yang membiaskan pilihan rasional mereka. Dengan demikian, kemungkinan konsensus tak perlu diragukan lagi menilik kemungkinan *sensus communis* juga tak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, limit politik demokrasi liberal sesungguhnya merupakan limit paradigma politik konsensus pada umumnya pula.

Ketakesesuaian dan ketakmemadaiannya demokrasi liberal juga tampak gamblang lewat uji koherensi antara kerangka artikulatifnya dan praksis politiknya dewasa ini. Konvergensi historis antara tradisi demokrasi dan wacana liberal meradikalisasi politik demokrasi lewat terciptanya paradoks konstitutif antaridealitasnya. Idealitas kesetaraan liberal yang berdasarkan pengakuan atas hak-hak individu sebagai hak azasi manusia lebih bersifat moral sehingga mengandung retorika universal, tak mempunyai batas-batas lingkup; sementara kesetaraan demokrasi yang berdasarkan pengakuan kedaulatan orang banyak sebagai *demos* lebih bersifat politis karena hanya berlaku dalam sebuah daulat *demos* tertentu, sehingga mempunyai lingkup terbatas. Paradoks konstitutif ini membuat politik demokrasi modern yang notabene demokrasi liberal itu mengidap keterbukaan konstitutif karena kemungkinan realisasi artikulatifnya menjadi takkan kunjung tertuntaskan akibat baku-gugat antar kedua idealitasnya. Padahal, dalam praksis politik global dewasa ini, demokrasi liberal justru melakukan hegemoni, sehingga bersamaan dengan tersingkirnya Komunisme, meredupnya Sosialisme, dan semakin menengahnya Sosial Demokrat, menghadapi pada paradoks praksis politiknya, yakni konstitutivitas keterbukaan keragaman di tengah praksis ketunggalan penutupan politik. Unipolaritas ini berbahaya bagi perkembangan politik demokrasi bukan hanya karena bertentangan dengan paradoks konstitutif yang merupakan sumber ketakterbatasan kemungkinan realisasi artikulatifnya, melainkan juga karena mengakibatkan kelowongan kebutuhan distingsi politik yang terbukti ikut merebakkan gejala Kanan ekstrim, politik identitas berbau etnis dan agama, bahkan terorisme politik.

Keempat, politik demokrasi berserta nilai-nilai derivatifnya --pengakuan perbedaan dan keragaman, penerimaan dissensus, dan perayaan keterbukaan

Universitas Indonesia

(kontingensi)— pada dasarnya masih tetap dapat mempertahankan kesesuaian dan kememadaianya terhadap tuntutan radikalisasi itu asalkan paradigma pemahaman dan penerapannya bukan lagi konsensus melainkan dissensus. Dalam paradigma dissensus, politik demokrasi pluralistis mengalami reformulasi politik subyek lewat radikalisasi asumsi-asumsi antropologisnya. Pertama, lewat pengakuan atas ketakterreduksian otonomi dalam korelasi, setiap agen sosial diterima sebagai unikum yang memiliki alteritas perbedaan tak terjembatankan. Kedua, lewat pengakuan atas ketakterreduksian antagonisme relasional, setiap agen sosial disadari dibentuk ‘seberang konstitutifnya’ (*constitutive outside*), sehingga keterhubungan antaragen sosial senantiasa ditandai diskursivitas tak tereduksikan akibat jejak rongrongan eksternalitas artikulatif para liyannya. Kedua reformulasi ini mengerucutkan ketakterreduksian alteritas dan diskursivitas keliyanan agen sosial, sehingga modus koeksistensi apapun harus senantiasa mengandaikan keragaman radikal lantaran keniscayaan anasir-anasir perbedaan serta dissensus —antagonisme relasional— dalam entitas sosialnya.

Pengakuan atas konstitutivitas antagonisme relasional di satu sisi seolah ‘memoderasi’ radikalitas otonomi dalam korelasi sehingga menghindarkan dari jebakan totalitas differensiasi partikular, sementara di sisi lain justru melanjutkan radikalisasi lewat infinitas kontingensi, sehingga politik keragamannya menjadi radikal bukan hanya karena keniscayaan perbedaan melainkan juga karena kesenantiasa keterbukaan, dan karena itu semakin menghindarkan dari jebakan totalitas dominatif pula. Jadi, meskipun menerima keniscayaan antagonisme relasional, demokrasi dissensus juga tak membiarkannya berkembang liar tak terkendali, melainkan senantiasa bersusah-payah mengoridorinya dalam idealitas-idealitas demokrasi pluralistis sehingga menjadi antagonisme yang lebih agonistis. Lawan dalam distingsi oposisional kawan/lawan dengan susah-payah senantiasa berusaha dibesut menjadi sekedar seteru (*friendly enemy*) —sebuah metaksi yang mengandung artikulasi kawan karena berbagi ruang simbolik yang sama, namun juga sekaligus artikulasi lawan karena ingin mengelola ruang simbolik itu dengan cara mereka sendiri. Pewacanaan Pluralisme Agonistis ini menggamblangkan kesesuaian dan kememadaian politik demokrasi pluralis terhadap tuntutan akan keragaman yang lebih terbuka dan toleransi yang lebih inklusif asalkan dipahami dan diterapkan bukan lagi sebagai sebuah upaya koeksistensial untuk mencapai konsensus apapun biaya sosiopolitikanya, melainkan lebih sebagai sebuah utopia koeksistensial untuk

mengelola dissensus secara sehat apapun resikonya. Jadi, politik demokrasi harus lebih disadari sebagai agoni mengelola konflik ketimbang deliberasi mencapai harmoni.

Kelima, peran politik demokrasi dissensus juga terbukti bisa ditingkatkan menjadi semacam ideologi payung (*umbrella discourse*) bagi gerakan-gerakan sosial baru bersehaluan pluralisme demokratis tanpa harus kehilangan koherensi terhadap kerangka artikulatifnya sendiri. Keruntutan artikulatif antara perannya sebagai ekuivalensi integratif blok solidaritas hegemonis pluralisme demokratis dan idealitas-idealitas konstitutifnya sendiri, yakni ketegangan paradoksal antara kebebasan dan kesetaraan, terutama berpulang pada watak kontingen dari pluralisme demokratisnya, yang mengakibatkan radikalitas politik keterbukaan.

Radikalitas kontingensi tersebut membuat kesatuan --sebagai konsekuensi kebutuhan praksis penggalangan blok solidaritas hegemonis-- dan otonomi --sebagai konsekuensi kebutuhan konstitutif pluralisme radikal dari paradigma dissensus-- bukanlah sasaran yang saling bertentangan melainkan bahkan merupakan ketegangan paradoksal in\determinasi setiap upaya koeksistensial yang bersifat konstitutif. Sejalan dengan itu, berbagai ketegangan diametral dalam struktur konseptual demokrasi dissensus, misalnya seperti im\possibilitas konstitusi-diri masyarakat, in\determinasi kontingensi utopia koeksistensial, universalisasi\otonomisasi dan ekuivalensi integratif\differentiasi partikular pada manajemen pergerakan demokratisasi, radikalisasi\domestikasi pada manajemen antagonisme relasional, maupun kebebasan\kesetaraan pada konvergensi idealitas-idealitas politik demokrasi pluralis radikal, juga bukan dipahami sebagai oposisi nyata atau kontradiksi, melainkan lebih sebagai paradoks konstitutif akibat keniscayaan antagonisme relasional. Begitu pula, penggalangan ekuivalensi integratif memang mengandaikan hegemoni, namun sama sekali tak bertentangan dengan idealitas pluralisme demokratis, karena dalam kerangka kontingensi radikal, stabilisasi kuasa disadari takkan kunjung pernah mungkin mencapai obyektivitas sosial. Kalaupun hegemoni terjadi, tak lebih dari sekedar 'penanda kesenjangan', jadi sekedar kesesaatan dalam rangkaian stabilisasi kuasa untuk memenuhi kekosongan ruang politikal, karena kekosongan tersebut takkan kunjung pernah sungguh terpenuhi akibat ketaktereduksian antagonisme relasional di dalamnya.

Keenam, ketercakupan dalam keikutsertaan (*partaking*) sementara, yang kerap diterima sebagai 'konsensus terbuka tak berakhir', pada dasarnya senantiasa mengandung

Universitas Indonesia

kontingensi artikulatif radikal serta niscaya menjejakkan relasi kuasa tak berkesudahan, sehingga lebih tepat dipahami dan diterima sebagai 'hegemoni terbuka tak berakhir'. Keikutsertaan dalam politik senantiasa diwujudkan lewat rangkaian keputusan yang setiap masing-masingnya senantiasa terbatas satuan ruang dan waktu pengambilan keputusan tertentu masing-masing tersebut, sehingga pada dasarnya lebih merupakan hasil stabilisasi kuasa sementara ketimbang kedudukan sementara koeksistensialitas, apalagi sosiabilitas, sebuah masyarakat.

Dalam kerangka hegemoni terbuka, orientasi metodis dari praksis politik lebih bertumpu pada agoni untuk mengerang ketidakepakatan dalam koridor idealitas-idealitas demokrasi. Gambanglah, betapapun konsensus disadari takkan kunjung pernah sungguh tercapai, tapi artikulasi konsensual, seperti upaya menggalang ekuivalensi integratif, melakukan domestikasi, ataupun meningkatkan determinasi dalam politik, secara tak langsung tetap terselenggara dalam politik demokrasi dissensus. Hanya saja, artikulasi konsensual tak menjadi upaya yang berdiri sendiri, apalagi menjadi titik berat praksis politik, melainkan selalu berada dalam cakrawala prioritas artikulasi dissensual, seperti menghormati kemerdekaan individual, mengakui dan menerima differensiasi partikular, mendorong otonomi, bahkan merangsang radikalisasi dalam politik.

Jadi, politik demokrasi dissensus pada dasarnya menempatkan dissensus dan konsensus dalam ketegangan paradoksal radikal\domestikasi lantaran lebih memosisikan diri sebagai sebetuk politik pluralisme demokratis yang menjadi radikal bukan hanya lantaran meyakini ketaktereduksian alteritas keliyanan agen sosial semata, melainkan juga lantaran menerima ketakterjembatanan diskursivitas agen sosial, yang 'memoderasi' ekstrimitas kesatusisian dissensual seraya melanjutkan radikalisasi lewat infinitas keterbukaan (kontingensi). Konstitutivitas in\determinasi politik sebagai utopia koeksistensial menginsyafkan bahwa pengabaian total salah satu modus koeksistensi tersebut akan sama-sama mengakibatkan bahaya penutupan politik, yakni antara anarkhi totalitas partikular lainnya politik identitas pada ekstrim dissensual dan dominasi totalitas ekuivalensial lainnya politik totaliter pada ekstrim konsensual.

## **6.2. Kontekstualitas dan Kontribusi Penelitian**

Pertama, keluhan paling sering muncul sehubungan Reformasi di Indonesia adalah reformasi telah berhenti, bahkan kerap kali juga disebut telah dibajak. Kita

Universitas Indonesia

terkadang terkecoh menganggap Reformasi terisi muatan tertentu, bahkan utuh-penuh-padu, karena merasa berhasil menghegemonikan artikulasi kepentingan tertentu, misalnya reformasi atas tertib politik-ekonomi lama, yang kasat mata termanifestasi lewat ketumbangan orde dan penguasa lama. Padahal, dalam paradigma politik sebagai utopia dan demokrasi sebagai politik dissensus, persoalan semacam ini lebih merupakan kelalaian para pihak untuk terus 'mengisi' Reformasi, dalam arti abai untuk berkelanjutan mereartikulasi muatan progresifnya sejalan idealitas-idealitas pokok politik demokrasi pluralis, sehingga jelas lebih merupakan persoalan keterceceran paradigmatis.

Reformasi, laiknya segenap formasi politik apapun, dan betapapun suksesnya melakukan stabilisasi kuasa bagaimanapun, bukanlah persoalan sekali jadi, karena mengandaikan rangkaian tindak artikulasi dalam ruang politikal yang senantiasa diwataki desisionisme sehingga niscaya bersifat spasiotemporal. Jadi, betapapun suksesnya Reformasi di negeri ini melakukan reartikulasi kepentingan politik lewat penyingkiran Orde Baru dan mantan Presiden Soeharto, pada galibnya hanyalah sebuah hegemoni sementara, yang akan dan harus terus-menerus dirawat progresivitasnya lewat rangkaian reartikulasi pluralisme demokratis. Formasi politik apapun pada galibnya hanyalah sekedar titik-temu antarartikulasi sementara dalam sebuah proses stabilisasi kuasa, sehingga senantiasa terpapar kontestasi, dalam arti terbuka terhadap reartikulasi para pihak di seluarnya maupun juga di dalamnya, dan karena itu tanpa reartikulasi diri berkelanjutan berkemungkinan 'dibajak', bahkan sepenuhnya disingkirkan kembali.

Jadi, pada galibnya, reformasi hanyalah sekedar penanda kosong (*empty signifier*), lantaran mengacu medan politikal yang senantiasa merupakan ruang kosong karena sekedar ajang kontestasi antar artikulasi-artikulasi yang berketerusan tak berkesudahan, sehingga merupakan diskursivitas abadi (*infininitudo*). Lewat pemahaman pluralisme dissensual, menjadi gamblanglah kepentingan merawat progresivitas formasi politik laiknya Reformasi lewat 'pengisian' atau reartikulasi berketerusan guna mempertahankan distansi terhadap penanda-pokok yang sementara menguasai medan politikalnya. Bahaya totalitas determinasi, atau totalitas dominasi ekuivalensial, bukan hanya bisa terjadi lantaran para pihak di seluar kita berhasil melakukan stabilisasi kuasa sementara lewat kehadiran artikulasi dominan tertentu belaka, melainkan juga bisa terjadi lewat keberhasilan kita sendiri melakukan stabilisasi kuasa sementara tersebut, namun selanjutnya secara langsung ataupun tidak langsung, atau secara sengaja ataupun

tidak sengaja, menghentikan proses perawatan progresivitas tersebut lantaran enggan atau abai melanjutkan reartikulasi terhadap dominasi artikulasi kita sendiri. Dalam konteks inilah, sejarah terus mengulang kisah tentang revolusi yang progresif namun berakhir dengan involusi yang sangat regresif karena pada akhirnya justru mengukuhkan pemerintahan diktatorial. Barangkali fosilisasi pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru di negeri ini merupakan contoh-contoh memilukan involusi regresif semacam ini, yang menjadi lebih gamblang silang-sengkarutnya jika ditelaah lewat rangkuman kesimpulan penelitian ini mengenai 'hegemoni terbuka tak berakhir'.

Kedua, kegundahan pascareformasi lain yang juga kerap kita dengar adalah ketidaksejajaran antara ekstensifikasi dan intensifikasi demokrasi. Kepesatan kemajuan demokrasi seperti diperlihatkan indikator-indikator fungsional-strukturalnya, terutama tampak menyolok lewat proliferasi kelembagaan demokrasi, tak berjalan seiring dengan pengejawantahan idealitas demokrasi pluralistis yang lebih hakiki, katakan spesialisasi kesetaraan dan kebebasan dalam ranah hukum, politik maupun sosial-ekonomi.

Dalam institusionalisasi pengawasan di lingkup formal kenegaraan, misalnya, dalam satu dasawarsa terakhir kita mencatat kelahiran hampir tiga-puluh komisi pengawasan resmi baru hanya dalam kerangka fungsionalitas demokratisasi hukum, ekonomi, dan politik. Belum lagi terbilang dalam ranah sosial lebih luas, seperti dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan, maupun kebudayaan. Para pihak juga menyebut keberanakan-pinakan kelembagaan yang sangat impresif di lingkup masyarakat madani dewasa ini, dengan hampir 60.000 LSM dalam berbagai bidang kajian, garapan, ataupun pengawasan, yang semestinya juga merupakan indikator kemajuan demokratisasi dari sisi partisipasi warga. Meskipun demikian, kita juga terus mencatat semakin banyaknya pelanggaran dan penyelewangan berbau KKN baru. Dalam masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku telah mengeluarkan hampir 150 ijin pemeriksaan kejahatan korupsi untuk pejabat di lingkup eksekutif setingkat Bupati ke atas. Belum lagi terbilang ratusan anggota DPR dan DPRD, serta pejabat teras di lingkungan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, bahkan komisi-komisi pengawasan itu sendiri, yang menjadi terdakwa maupun sudah terpidana. Kasus-kasus mega korupsi dan HAM berat lama juga masih sangat banyak yang terbengkalai. Terlebih lagi kalau kita juga berbicara mengenai keterbengkalaiannya persoalan pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, maupun penanggulangan kemiskinan.

Anomali tersebut boleh jadi memperlihatkan betapa konsolidasi pluralisme demokratis sebetulnya belum sungguh-sungguh terjadi di negeri ini. Reformasi lebih merupakan akibat agregat paksaan kekuatan eksternal, terutama kemacetan sosial-ekonomis yang sudah sedemikian menimbulkan ketidakberdayaan masyarakat luas berkelindan dengan ketidakpuasan politis yang juga sudah sedemikian memuncakkan kemarahan masyarakat di segala bidang, ketimbang akibat tataran kesadaran politis internal masyarakat politik kita sendiri. Gambelangnya, bukan hanya intensifikasi demokrasi, sebetulnya ekstensifikasi demokrasi juga belum sungguh berlangsung.

Dalam kerangka radikalisme pluralisme demokratis dissensual, ekstensifikasi demokrasi sesungguhnya tidak hanya mewujudkan lewat keberanak-pinakan institusional demokrasi belaka --spasialisasi horisontal demokrasi-- melainkan juga tak kalah pentingnya perambahan transparansi dan akuntabilitas demokrasi ke segenap lapisan institusional yang ada --spasialisasi vertikal demokrasi. Seperti bisa kita lihat dari carut-marut berbagai persoalan KKN berdimensi kekuasaan yang semakin marak dalam skala cakupan, besaran, maupun tataran keterlibatan formal-institusionalnya belakangan ini, justru tepat pada vertikalisasi demokrasi inilah spasialisasi demokrasi kita tak berdaya, karena tak sanggup menembus ketertutupan jejaring kekuasaan pada tingkat puncak masing-masing kelembagaan negara. Proliferasi demokrasi lebih menyangkut komisi-komisi pengawasan yang pada galibnya merupakan lembaga ekstraformal sehingga bisa dimengerti ketakberdayaannya dalam memperbaiki kinerja demokrasi di negeri ini. Sejalan konteks ini, ekstensifikasi demokrasi lewat proliferasi horisontal bisa lebih mudah berlangsung ketimbang teritorialisasi vertikal lantaran tidak menyangkut jejaring birokratisasi ketertutupan penyelenggaraan dan pengawasan negara yang terlanjur berkerak dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Dengan demikian, proliferasi demokrasi bisa berlangsung lebih memadai karena lebih tidak mengganggu kepentingan kekuasaan dan ekonomi, serta bisa menjadi 'tontonan' betapa sudah cukup akomodatifnya kekuasaan di negeri ini terhadap tuntutan demokratisasi.

Ketiga, mirip lukisan Zizek atas Rumania pasca Ceausescu, berbagai appropriasi ideologis 'baru' juga memasuki gelanggang politik Indonesia pasca Orde Baru, untuk mengisi 'kelowongan' artikulatif Reformasi. Seperti sudah bisa diduga, mengingat penindasan ideologis mereka lewat kebijakan penyederhanaan kepartaian dan massa mengambang semasa Orde Baru, maka yang paling berkecambah menghasilkan partai

Universitas Indonesia

baru adalah haluan Islam dan nasionalis. Oleh karena itu, menjadi tanda tanya besar mengapa terlepas kelahiran sedemikian banyak partai politik berhaluan Islam, appropriasi ideologis ini juga memunculkan kekuatan baru lain dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, yang perjuangan artikulasinya sering terselipi kepentingan politis pula, terutama berdasarkan kepentingan agama dan etnis. Menyebut beberapa yang paling menonjol, misalnya saja, Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Betawi Rempug (FBR).

Kalau ketaktertampungan artikulasi politik memang berada di balik gejala ini, barangkali menarik untuk menengarai kemiripan reaksi artikulatifnya pada beberapa negara Eropa belakangan ini, yakni gelombang pasang artikulasi politik Kanan atau bahkan Kanan-ekstrim, seperti terlihat lewat pengagulan politik identitas mereka. Barangkali, terlepas dari kenyataan sangat sedikitnya keterlibatan pada skandal-skandal besar KKN sehingga berhasil membuktikan diri sebagai partai yang relatif bersih, peningkatan peraihan suara secara signifikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan politik Kanannya yang cukup fundamental pada pemilu 2009 lalu, justru ketika seluruh partai-partai agama lainnya mengalami kemerosotan, juga bisa menggambar gejala ketaktertampungan artikulatif tersebut, yang mirip di negara-negara Eropa itu, terbukti reaksinya bisa berlangsung pada tataran partai ataupun non-partai.

Mencoba mengabstraksi simtoma tersebut, pada semua negara itu sama-sama terjadi pemusatan kekuatan politik lewat koalisi lintas spektrum ideologis berkepanjangan, sehingga membuat distingsi politik mengabur dan medan politikal menjadi unipolar. Dalam kerangka pluralisme demokratis dissensual, monologisme politik semacam ini seolah mengundang kedatangan alternatif artikulasi demi 'normalisasi' distingsi oposisional. Menilik spektrum koalisi lintas ideologis tersebut melibatkan baik partai berhaluan Kiri maupun Kanan, maka pemusatan kekuatan ini secara tidak langsung juga melakukan pemusatan ideologis ke Tengah (*centering*), sehingga secara topologis mengakibatkan kelowongan spasial bagi alternatif artikulasi pada Kiri atau Kanan, atau bahkan Kiri ekstrim atau Kanan ekstrim. Kalau gelombang kekuatan kanan, atau bahkan Kanan ekstrim, yang ternyata muncul, seperti juga terjadi di Indonesia, semata-mata lebih karena demoralisasi memang sedang melanda politik Kiri sejalan dengan tersingkirnya Komunisme, meredupnya Sosialisme, dan semakin ke tengahnya kecenderungan Sosial Demokrat dalam percaturan politik global dewasa ini.

Pemusatan kekuasaan lintas spektrum ideologis semacam ini jelas juga bukan peristiwa langka di negeri ini. Sekarang bernama koalisi besar lintas partai, dulu di masa Orde Lama bernama Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) dan di masa Orde Baru bernama azas tunggal. Oleh karena itu, dalam kerangka keterbengkalaiian distingsi oposisional yang bersifat konstitutif bagi politik ini, kita bisa lebih memahami *raison d'être* perebakan luar biasa partai-partai berbasis agama, bahkan sempat ada yang berbasis etnis pula seperti Partai Tionghoa Indonesia, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mengatasnamakan politik identitas, baik agama maupun etnis, yakni: ketaktertampungan artikulatif akibat pemusatan kekuatan dan spektrum kepentingan maupun ideologis. Mouffe bahkan beranggapan unipolaritas ini juga ikut bertanggung-jawab atas kemunculan gerakan-gerakan kekerasan berdimensi politis, bahkan juga terrorisme, karena baginya penyumbatan kanal penyaluran antagonisme yang lebih formal-institusional semacam ini justru mengakibatkan perbedaan, maupun dissensus dan konflik akibatnya, mencari kanal-kanal penyaluran lain yang terkadang menjadi berbahaya karena tanpa mengindahkan kaidah-kaidah demokrasi lagi.

Keempat, ketaksejajaran indikator kesuksesan prosedural, fungsional-struktural, maupun behavioral dengan pengejewantahan idealitas politik demokrasi pluralistis yang lebih mendasar, katakanlah mewujudkan kesetaraan dan kebebasan berserta segenap nilai-nilai derivatifnya atas pengakuan perbedaan, keragaman, serta keterbukaan, seperti antara lain terlihat lewat pembengkalaian penegakan hukum dan HAM serta pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, maupun penanggulangan kemiskinan sebagai janji-janji utama Reformasi, semakin mengeraskan kemendesakan penerapan pendekatan politik yang dipakai penelitian ini. Pendekatan spasial berlandaskan reformulasi politik subyek atas agen sosial sebagai alteritas dan diskursivitas keliyanan tak tereduksikan ini setidaknya bisa memberikan pemahaman yang bukan hanya lebih realistis melainkan juga otentik, karena lalu melihat politik lebih sebagai interrelasi manusia-manusia kongkrit dalam medan kontestasi antar artikulasi-artikulasi kepentingan nyata yang tak berkesudahan lantaran tak terjembatankan, sehingga senantiasa antagonis dan karena itu lalu juga niscaya kontingen. Dengan demikian, pendekatan ini mengantarkan pada pemahaman akan politik pluralisme demokratis yang menjadi radikal bukan lantaran dissensual belaka, melainkan juga secara setimbang kontingen pula, sehingga lebih sejalan dengan agenda ketertujuan sosiopolitik dewasa ini, yang seperti termasuk

Universitas Indonesia

diadopsi Reformasi di negeri ini, semakin menuntut politik keragaman yang terbuka dan toleransi yang inklusif, lantaran menyadari radikalitas proliferasi pluralitas maupun terutama konsekuensinya pada paralogi dan dissensus. Dalam konteks tersebut, pendekatan atas politik yang selama ini lebih dipahami sebagai fenomena moral seperti pada pemikiran politik klasik, atau lebih sebagai fenomena behavioral atau struktural-fungsional seperti pada pemikiran politik modern, setidaknya bisa diperlengkapi dan bahkan diperkaya dengan pemahaman atas politik lebih sebagai fenomena spasial dari pemikiran politik kontemporer ini.

Kelima, sebagai warga negara dari sebuah negeri yang selama tiga dasawarsa menganut azas tunggal dalam politiknya, yang lalu bahkan ditafsirkan lebih sempit lagi menjadi kepemimpinan satu partai berkuasa saja, dan boleh jadi bahkan satu orang penguasa saja, kita tentu lebih dari maklum mengenai arti bahaya monologisme politik tanpa seteru. Dalam konteks apapun dan dalam lingkup manapun, membiarkan totalitas dominatif semacam ini berkembang tentu akan menuai banyak persoalan sosiopolitik eksekutif, seperti telah kita ungkap sehubungan praktik idolatri konsensual Orde Baru yang dengan mudah dan cepat bertiwikrama menjadi politik pemusatan kekuasaan, sehingga memerosokkan kita ke dalam ketakberdayaan berkepanjangan terhadap banalisasi dedemokratisasi segenap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rangkaian persoalan ini terutama akan terjadi dengan sendirinya bukan akibat kesewenangan yang segera terbayang karena entitas politik yang berperan sebagai pusat kuasa lalu bebas mendefinisikan baik dirinya sendiri maupun segenap pihak di luar dirinya, melainkan terutama karena hilangnya dinamika ketegangan kreatif antar entitas-entitas sosiopolitik di dalamnya akibat mengerdilnya ranah-ranah kuasa alternatif, sehingga otokonstitutivitas dan otoregulativitas segenap mekanisme pengawasan, pengontrolan, pengujian dan penyetimbangan, maupun mekanisme-mekanisme rekonstruktif lainnya yang mengandaikan kesalingan antar entitas, akan melayu lemas dengan sendirinya.

Menilik kemiripan situasional ini saja, kiranya jelas betapa kontekstualisasi wacana unipolaritas politik menjadi bahaya idolatri konsensual pemusatan kekuasaan berlebihan, perlu menjadi kajian strategis demi kewarasan perkembangan politik di negeri kita. Terlebih lagi, tendensi mempercayai kurang pentingnya budaya oposisi masih terus hidup di kalangan para penguasa dan politikus kita, seperti tampak lewat penggalangan kekuatan berlebih-lebihan melalui koalisi-koalisi besar lintas spektrum

Universitas Indonesia

ideologis yang tak putus-putusnya dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Dalam politik dianggap cuma ada pilihan menjadi kawan atau lawan; dan lawan berarti musuh sehingga harus dilenyapkan. Padahal, dalam kerangka Pluralisme Agonistis dari politik demokrasi dissensus, bukan saja keberadaan oposan atau lawan politik adalah konsekuensi relasional yang wajar saja, melainkan bahkan potensi antagonisme laten pada sekutu atau kawan politik sekalipun juga wajar saja, karena sekedar perwujudan alteritas dan diskursivitas keliyatan segenap masing-masing individu sebagai agen sosial belaka. Dengan demikian, Pluralisme Agonistis di satu sisi memperlihatkan bahwa politik adalah perjuangan bersusah-payah untuk justru senantiasa merawat antagonisme sebagai dinamika kreatifnya agar mekanisme kritik, kontrol, dan rekonstruksi dapat terbangun sehingga demokrasi dapat terus meremajakan gagasan, manusia, maupun lembaganya. Sementara di sisi lain, antagonisme juga takkan dibiarkan berkembang liar tak terkendali, melainkan senantiasa dikoridori agar dapat lebih selaras dengan idealitas demokrasi pluralistis.

Kiranya, Agonisme merupakan salah satu bagian paling penting pemikiran ini yang dapat disumbangkan bagi budaya politik kita yang masih cenderung melihat masalah dengan hitam-putih (tipologis), kurang menyadari pentingnya antagonisme relasional sebagai konstitutivitas dinamika koeksistensial, kurang menyadari pentingnya budaya oposisi sebagai konstitutivitas mekanisme rekonstruktif, kurang menghargai proses agoni kesinambungan terhadap baik kawan, seteru, apalagi lawan karena segan bersusah-payah. Terlebih lagi, kita mempunyai sejarah panjang menuai kekerasan berdarah akibat menindas perbedaan dan dissensus dengan kekerasan. Sosialisasi konseptual atas pluralisme demokratis semacam ini bisa ikut menggugah para pelaku politik kita untuk lebih menyadari keniscayaan perbedaan dan dissensus, namun sebaliknya juga menyadari kepentingan untuk mengoridorinya dalam idealitas demokrasi pluralistis. Politik pluralisme demokratis yang memadai adalah agoni tak berkesudahan untuk mengelola perkelindanan ketegangan paradoksal oposisi\koalisi sebagai perwujudan kesadaran akan kesetimbangan kebutuhan antara radikalisasi dan domestikasi dalam politik agar kebersamaan kita tak menjadi liar tak terkendali namun juga tak jadi macet jalan di tempat. Dengan demikian, penelitian dan pengembangan lanjut wacana ini akan sangat membantu dalam memberi alternatif kerangka teoritis-filosofis yang mendasar bagi perkembangan budaya demokrasi pluralistis yang sehat di negeri kita.

Universitas Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R. O'G.,  
(1990), *Language and Power; Exploring Political Cultures in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press.
- , (2000), *Imagined Communities*, London: Verso.
- Badiou, Alain,  
(2003), *Infinite Thought; Truth and the Return of Philosophy*, London: Continuum.
- Baker, Anton,  
(1986), *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bauman, Zygmunt,  
(1996), *Postmodern Ethics*, Oxford: Blackwell.
- , (1998), *Modernity and Ambivalence*, Cambridge: Polity Press.
- , (2003), *Intimations of Posmodernity*, London: Taylor & Francis e-Library.
- Beiner, Ronald, (ed.),  
(1995), *Theorizing Citizenship*, Albany: State University of New York Press.
- Bellamy, Richard,  
(1999), *Liberalism and Pluralism, Towards A Politics of Compromise*, London: Routledge.
- Benhabib, Seyla, (ed.),  
(1996), *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political*, New Jersey: Princeton University Press.
- Blaug, Ricardo, & John Schwarzmantel, (ed.),  
(2000), *Democracy; A Reader*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Bobbio, Norberto,  
(1987), *The Future of Democracy; A Defense of the Rules of the Game*, Cambridge: Polity Press.
- , (1988), *Which Socialism?*, Cambridge: Polity Press.
- , (1990), *Liberalism & Democracy*, London: Verso.
- , (1996), *Left & Right; The Significance of a Political Distinction*, Cambridge: Polity Press.
- Borradori, Giovanna,  
(2005), *Filsafat dalam Masa Terror, Dialog dengan Jurgen Habermas dan Jacques Derrida*, alih bahasa Alfons Taryadi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Caporaso, James A., dan David P. Levine,  
(1996), *Theories of Political Economy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Castoriadis, Cornelius,  
(1998), *The Imaginary Institution of Society*, Cambridge: The MIT Press.
- Christman, John,  
(2002), *Social and Political Philosophy, A Contemporary Introduction*, London: Routledge.
- Connolly, William E.,  
(1995), *The Ethos of Pluralization*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- , (1991), *Identity\Difference: Democratic Negotiations of Political Paradox*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Crick, Bernard,  
(2002), *Democracy: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Critchley, Simon,  
(1999), *Ethics-Politics-Subjectivity*, London: Verso.
- Cunningham, Frank,  
(2002), *Theories of Democracy, A Critical Introduction*, London: Routledge.
- Dallmayr, Fred,  
(1989), *Margins of Political Discourse*, New York: State University of New York Press.
- Deleuze, Gilles,  
(1995), *Kant's Critical Philosophy*, London: The Athlone Press.
- Derrida, Jacques,  
(1992), *Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority"*, dalam Cornell, Drucilla, (ed.), *Deconstruction and the Possibility of Justice*, London: Routledge.
- , (1997), *Remarks on Deconstruction and Pragmatism*, dalam Mouffe, Chantal, (ed.), *Deconstruction and Pragmatism*, London: Routledge.
- , (2000), *Politics of Friendship*, London: Verso.
- Derry, Gregory N.,  
(1999), *What Science Is and How It Works*, New Jersey: Princeton University Press.
- de Soto, Hernando,  
(2000), *The Mystery of Capital*, New York: Basic Books.
- Dewey, John,  
(1955), *Reconstruction in Philosophy*, New York: Mentor Books.
- Easton, David,  
(1988), *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik*, Jakarta: Bina Aksara.
- Easton, David, dan Almond, Gabriel,  
(2000), dalam Mohtar Mas'ood & Colin MacAndrews, (ed), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Elshtain, Jean Bethke,  
(1995), *Democracy on Trial*, New York: Basic Books.
- Flynn, Bernard,  
(2005), *The Philosophy of Claude Lefort; Interpreting the Political*, Evanston: Northwestern University Press.
- Giddens, Anthony,  
(1998), *The Third Way, The Renewal of Social Democracy*, Cambridge: Polity Press.
- , (2000), *The Third Way and Its Critics*, Cambridge: Polity Press.
- , (2001), *Modernity and Self-Identity; Self and Society in the Late Modern Age*, Cambridge: Polity Press.
- , (2003), *Runaway World, How Globalization is Reshaping Our Lives*, New York: Routledge.
- Goodin, Robert E., & Hans-Dieter Klingemann, (ed.),  
(1998), *A New Handbook of Political Science*, Oxford: Oxford University Press.
- Goodin, Robert E., & Philip Pettit,  
(2003), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Carlton: Blackwell Publishing.

- Gray, John,  
(1996), *Post-Liberalism, Studies in Political Thought*, London: Routledge.
- Habermas, Jurgen,  
(2000), *The Public Sphere: An Encyclopedia Article*, dalam Blaug & Schwarzmantel, (ed.), *Democracy; A Reader*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Howarth, David,  
(2000), *Discourse*, Buckingham: Open University Press.
- Imre Lakatos, et al., (ed.),  
(1989), *Criticism and the Growth of Knowledge*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Inoguchi, Takashi, et al., (ed.),  
(1998), *The Changing Nature of Democracy*, Tokyo: United Nations University Press.
- Jameson, Fredric,  
(1991), *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late-Capitalism*, London: Verso.
- Keenan, Alan,  
(2003), *Democracy in Question, Democratic Openness in A Time of Political Closure*, Stanford: Stanford University Press.
- Klima, Ivan,  
(1999), *Between Security and Insecurity*, London: Thames & Hudson.
- Kockelmans, Joseph J., (ed.),  
(1967), *Phenomenology; The Philosophy of Edmund Husserl and Its Interpretation*, New York: Anchor Books.
- Koentjaraningrat,  
(1984), *Kepemimpinan dan Kekuasaan: Tradisional, Masa kini, Resmi dan Tak Resmi*, dalam Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Kuhn, Thomas,  
(1970), *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: The University of Chicago Press.
- , (1989), *Logic of Discovery or Psychology of Research?*, dalam Imre Lakatos, et al., (ed.), *Criticism and the Growth of Knowledge*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kymlicka, Will,  
(1990), *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, Oxford: Clarendon Press.
- Laclau, Ernesto,  
(1990), *New Reflections on the Revolution of Our Time*, London: Verso.
- , (2007), *Emancipation(s)*, London: Verso.
- , dan Chantal Mouffe,  
(1994), *Hegemony & Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics*, London: Verso.
- , Judith Butler, dan Slavoj Zizek,  
(2000), *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*, London: Verso.
- Lefort, Claude,  
(1988), *Democracy and Political Theory*, Cambridge: Polity Press.

- , (2007), *Complications; Communism and the Dilemma of Democracy*, New York: Columbia University Press.
- Levinas, Emmanuel,  
(1995), *Totality and Infinity*, Pittsburgh: Duquesne University Press.
- , (1999), *Alterity & Transcendence*, New York: Columbia University Press.
- , (2000), *Ethics and Infinity*, Pittsburgh: Duquesne University Press.
- Linz, Juan J., & Stepan, Alfred,  
(1996), *Problems of Democratic Transition and Consolidation; Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Lubis, Akhyar Yusuf,  
(2006), *Dekonstruksi Epistemologi Modern*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Lumms, C. Douglas,  
(1996), *Radical Democracy*, Ithaca: Cornell University Press.
- Liotard, Jean-Francois,  
(1996), *The Inhuman, Reflections of Time*, Stanford: Stanford University Press.
- , (2001), *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Manchester: Manchester University Press.
- Marcuse, Herbert,  
(1969), *One Dimensional Man, The Ideology of Industrial Society*, London: Sphere Books Ltd.
- , (1972), *Studies in Critical Philosophy*, Boston: Beacon Press.
- Marx, Karl,  
(1961), *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, Moscow: Foreign Language Publishing House.
- , (1977), *Grundrisse*, dalam David Mclellan, *Karl Marx, Selected Writings*, New York: Oxford University Press.
- McClelland, J.S.,  
(1999), *A History of Western Political Thought*, London: Routledge.
- Mclelland, David, (ed.),  
(1977), *Karl Marx: Selected Writings*, New York: Oxford University Press Inc.
- McBride, William L.,  
(1994), *Social and Political Philosophy*, Saint Paul: Paragon.
- More, Thomas,  
(2001), *Utopia*, New Haven & London: Yale University Press.
- Mouffe, Chantal, (ed.),  
(1993), *The Return of the Political*, London: Verso.
- , (ed.), (1995), *Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community*, London: Verso.
- , (1996), *Democracy, Power, and the "Political"*, dalam Seyla Benhabib, (ed.), *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political*, New Jersey: Princeton University Press.
- , (ed.), (1997), *Deconstruction and Pragmatism*, London: Routledge
- , (ed.), (1999), *The Challenge of Carl Schmitt*, London: Verso.
- , (2000), *The Democratic Paradox*, London: Verso.
- , (2005), *On the Political*, London: Routledge.

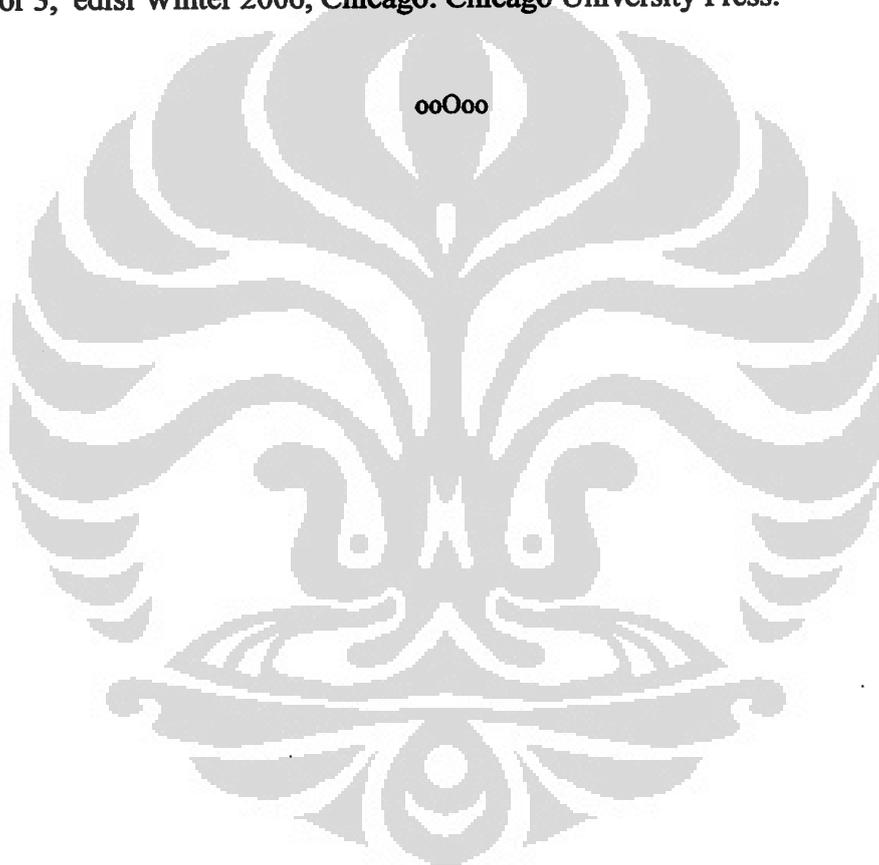
- Negroponte, Nicholas,  
(1999), *Being Digital: Menyiasati Hidup dalam Cengkeraman Sistem Komputer*, Bandung: Miizan Pustaka.
- Parekh, Bhikhu,  
(1998), *Political Theory: Traditions in Political Philosophy*, dalam Robert E. Goodin, & Klingemann, Hans-Dieter, (ed.), *A New Handbook of Political Science*, Oxford: Oxford University Press.
- Peursen, C.A. van,  
(1976), *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Rawls, John,  
(1996), *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press.  
———, (2000), *A Theory of Justice*, Oxford: Oxford University Press.  
———, (2001), *Collected Papers*, Cambridge: Harvard University Press.
- Rescher, Nicholas,  
(1995), *Pluralism: Against the Demand for Consensus*, Oxford: Oxford University Press.
- Rigney, Daniel, 2001,  
*The Metaphorical Society, An Invitation to Social Theory*, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
- Schmitt, Carl,  
(1996), *The Concept of the Political*, Chicago: The University of Chicago Press.  
———, (2000), *The Crisis of Parliamentary Democracy*, Cambridge: MIT Press.
- Sen, Amartya,  
(2000), *Development as Freedom*, New York: Anchor Books.  
———, (2001), *Poverty and Famines*, New Delhi: Oxford University Press.
- Smith, Anna Marie,  
(1998), *Laclau and Mouffe: The Radical Democratic Imaginary*, London: Routledge.
- Smith, Sam,  
(1999), *Ethics and Postmodernity*, dalam Christopher Dowrick, et al., (ed.), *General Practice and Ethics*, London: Routledge.
- Sterba, James P., (ed),  
(2001), *Social and Political Philosophy: Contemporary Perspectives*, London: Routledge.
- Stiglitz, Joseph E.,  
(2002), *Globalization and Its Discontents*, New York: W. W. Norton & Company.  
———, (2002), *Making Globalization Work*, London: Allen Lane-Penguin Books.
- Tallis, Raymond,  
(1995), *Newton's Sleep, Two Cultures and Two Kingdoms*, New York: St. Martin Press.
- Turner, Bryan S., (ed.),  
(2000), *The Blackwell Companion to Social Theory*, Oxford: Blackwell.
- Unger, Roberto Mangabeira,  
(2000), *Democracy Realized: The Progressive Alternative*, London: Verso.
- Van Haute, Phillippe & Peg Birmingham, (ed.),  
(1995), *Dissensus Communis; Between Ethics and Politics*, The Netherlands: Kok Pharos Publishing House.

- Wasby, Stephen L.,  
(1970), *Political Science – The Discipline and Its Dimensions: An Introduction*, New York: Charles Scribner's Sons.
- Wolin, Richard,  
(2004), *The Seduction of Unreason: The Intellectual Romance with Fascism from Nietzsche to Postmodernis*, New Jersey: Princeton University Press.
- Young, Irish Marion,  
(1990), *Justice and the Politics of Difference*, New Jersey: Princeton University Press.
- Zizek, Slavoj,  
(1990), *Beyond Discourse-Analysis*, dalam Ernesto Laclau, (ed.), *New Reflections on the Revolution of Our Time*, London: Verso.
- , (1994), *Tarrying with the Negative; Kant, Hegel, and the Critique of Ideology*, Durham: Duke University Press.

### Sumber-Sumber Lain:

- Bagus, Lorens,  
(2002), *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bourdieu, Pierre,  
(1998), *Utopia of Endless Exploitation, The Essence of Neoliberalism*, dalam *Le Monde Diplomatique*, Desember 1998. (online)
- Brewer, E. Cobham, LL.D.,  
(1978), *The Dictionary of Phrase and Fable, The Classic Reference for Writers, Speakers, and Students*, New York: Avenel Books.
- George, Susan,  
(1999), *A Short History of Neoliberalism*, sebuah makalah untuk *Conference on Economic Sovereignty in a Globalising World*, 24-26 Maret 1999. (online)
- Hornby, AS,  
(1977), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press.
- Iriantoko, Agung,  
(2003), *A Pilgrim toward Supranational Democracy: Arguments/Politics of Citizenship and Civil Society in the Age of Globalisation*, makalah untuk seminar *Kapitalisme Global dan Tindakan Komunikatif* di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Agustus 2003.
- Jameson, Fredric,  
(2004), *Politics of Utopia*, dalam jurnal *New Left Review*, volume 25, seri 2, edisi Januari-Februari 2004, London: New Left Review Ltd.
- Kompas*,  
(26 Nopember 2007). (laporan)  
(24 Maret 2009). (laporan)  
(22 Mei 2010). (laporan)
- Laclau, Ernesto,  
(1994), *Negotiating the Paradoxes of Contemporary Politics*, dalam Howarth, David, & Norval, Aletta J., (ed.), *Reconsidering the Political*, dalam jurnal *Angelaki* I: 3, Great Britain: Watkiss Studios Limited.

- , (2006), *Why Constructing a People Is the Main Task of Radical Politics*, dalam jurnal *Critical Inquiry*, volume 32 nomor 4, edisi Winter 2006, Chicago: Chicago University Press.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,  
(1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Shadily, Hassan, et al., (ed.),  
*Ensiklopedi Indonesia*, jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru – van Hoeve.
- Zizek, Slavoj,  
(2004), *The Parallax View*, dalam jurnal *New Left Review*, volume 25, seri 2, edisi Januari-Februari 2004, London: New Left Review Ltd.
- , (2006), *A Plea for A Return to Differance (with A Minor Pro Domo Sua)*, dalam jurnal *Critical Inquiry*, volume 32 nomor 2, edisi Winter 2006, Chicago: Chicago University Press.
- , (2006), *Against Populist Temptation*, dalam jurnal *Critical Inquiry*, volume 32 nomor 3, edisi Winter 2006, Chicago: Chicago University Press.



## Riwayat Hidup

### Data Pribadi

Nama : Budiarto Danujaya  
 Tempat/Tanggal Kelahiran : Pekalongan / 15 Oktober 1956  
 Isteri : Yustina Danujaya  
 Anak-Anak : Orchida Sekarratri & Degas Elangpaksi

### Latar Belakang Pendidikan

Tahun 1982 : Meraih gelar Doctorandus (Drs) dari Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dengan predikat *cumlaude* (IP kumulatif 3, 72).  
 Tahun 1993 : Meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta, dengan IP kumulatif 3,32.  
 Tahun 1995 : Lulus ujian negara dan meraih gelar Magister Manajemen (MM).  
 Tahun 2003-2006 : Meraih gelar Magister Humaniora (MHum) dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dengan IP kumulatif 3,85.  
 Tahun 2004-2005 : Menempuh program pasca-sarjana (S2) politik ekonomi di Universitas Nasional. (Tidak melanjutkan)  
 Tahun 2006-sekarang : Sedang menempuh program doktoral (S3) pada Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

### Pengalaman Kerja

Tahun 1977-1980 : Penulis lepas untuk beberapa media di Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta (dalam bentuk artikel, esai budaya, cerpen, puisi, dan novelet).  
 Tahun 1981-1987 : Wartawan desk luar negeri, umum, dan lalu kebudayaan pada Harian Kompas.  
 Tahun 1988-1989 : Redaktur Pelaksana, Wakil Pemimpin Redaksi, dan lalu Pejabat Pemimpin Redaksi Majalah Berita Jakarta-Jakarta.  
 Tahun 1990-1993 : Wakil Direktur Kelompok Majalah & Tabloid Gramedia.  
 Tahun 1995-1998 : Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas.  
 Tahun 1998-2000 : Redaktur Opini Harian Kompas.  
 Tahun 2000-2003 : Wakil pemimpin Redaksi dan lalu Pejabat Pemimpin Redaksi pada PT Linknet (LippoStar.com).  
 Sejak tahun 2003 : Penulis lepas sosial-politik dan budaya serta cerpen.  
 Sejak tahun 2005 : Pengajar tetap Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Sekarang mengampu Filsafat Politik dan Diskursus Ideologi.

### Karya Tulis

Menulis beberapa ratus artikel dan esai dalam bidang sastra, teater, film, budaya, dan sosial-politik. Mulai menulis cerpen sejak di sekolah menengah atas dan menerbitkan artikel di berbagai media massa sejak tahun kedua di universitas (1977). Pernah

nendapat berbagai penghargaan dalam bidang penulisan, baik kritik sastra, artikel, esai, puisi, cerpen, novelet, maupun karya jurnalistik.

Artikel, esai, dan cerpennya ikut diterbitkan dalam berbagai buku, antara lain:

- *Budaya Sastra* (Rajawali, 1984) -- (esai sastra)
- *Iwan Simatupang Pembaharu Sastra* (Arus, 1985) -- (esai sastra)
- *Australia di Mata Indonesia* (Gramedia, 1989) -- (artikel sosial-budaya)
- *Menuju Masyarakat Baru Indonesia* (Gramedia, 1990) (esai budaya)
- *Layar Perak* (Pustaka Utama, 1992) -- (esai tentang sejarah film)
- *Lampor* (Kompas, 1994) -- (esai sastra)
- *Dua Tengkorak Kepala* (Kompas, 2000) -- (esai sastra)
- *1000 Tahun Nusantara* (Kompas, 2000) -- (dua buah esai tentang seni dan tokoh budaya)
- *Sepi pun Menanti di Tepi Hari* (Kompas, 2004) -- (cerpen)
- *Siapa Mau Jadi Presiden* (Kompas, 2004) -- (dua buah artikel sosial-politik)
- *Pendidikan Manusia Indonesia* (Toyota Astra-Kompas, Desember 2004) -- (risalah filosofis panjang mengenai sains dan etika)
- *Laporan Wartawan Kompas 1965-2005*, (Kompas, 2005) -- (serial tiga esai budaya)
- *Riwayat Negeri yang Haru, Cerpen Kompas Terpilih 1981-1990* (Kompas, 2006) -- (sebuah cerpen)
- *111 Kolom Bahasa Kompas* (Kompas, 2006) -- (empat buah esai bahasa)
- *Rendra: Ia Tak Pernah Pergi* (2009) --(dua buah esai seni)
- *Pada Suatu Hari, Ada Ibu dan Radian* (Kompas, 2010) -- (esei sastra)

Menjadi editor untuk kumpulan cerpen:

- *Laki-Laki yang Kawin dengan Peri* (Kompas, 1995)

Karya-karya ilmiahnya:

- *Metode Instrumentalisme-Eksperimentalisme John Dewey* (Skripsi, Universitas Gajah Mada, 1982)
- *Strategi Pengembangan Usaha Majalah Jakarta-Jakarta* (Thesis, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, 1993)
- *Etika dan "Techno-Science" pada Era Telekoinonia dalam Pendidikan Manusia Indonesia* (Risalah filosofis mengenai sains dan etika, Toyota Astra-Kompas, 2004)
- *Pluralisme Agonistis: Radikalisasi Demokrasi Pluralistis Chantal Mouffe* (Sebuah kajian Filosofis atas Realitas Politik dan Transformasi Demokrasi) (Thesis, Universitas Indonesia, 2006)
- *Demokrasi & Distingsi: Signifikansi Ideologi dalam Politik Kesejahteraan* (Risalah kuliah umum di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2007)
- *Demokrasi Sebagai Politik Dissensus (Utopia Koeksistensial di Era Paradoks)* (Disertasi, Universitas Indonesia, 2010)

Kumpulan esai sosial-politiknya terbit sebagai buku dengan judul:

- *Hari-Hari Indonesia Gus Dur* (Galang, 2001)

ooOoo